

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2017



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
2017



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2017

ISBN : 978-602-6735-31-7
No Publikasi : 14010.1821
Katalog : 4102004.1401
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 82 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

Diterbitkan oleh:

© **Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi**

Dicetak oleh

CV. M&N Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

TIM PENYUSUN PUBLIKASI

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017

Pengarah & Penanggung Jawab Umum:
Khairunas, SE

Penanggung Jawab Teknis:
Fitri Mulyani, SST

Editor:
Adhitya Nugraha, SST

Penulis dan Pengolahan Data:
Fitri Mulyani, SST

Desain Kover:
Adhitya Nugraha, SST

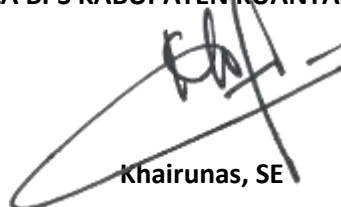
KATA PENGANTAR

Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam bidang kesejahteraan rakyat, maka BPS Kabupaten Kuantan Singingi sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi 2017

Publikasi ini merupakan salah satu produk tahunan BPS Kabupaten Kuantan Singingi yang menyajikan data kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat ini sebagian besar bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Teluk Kuantan, Desember 2018
KEPALA BPS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Khairunas, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB 1 KARAKTERISTIK PENDUDUK	1
1.1Perkembangan Penduduk	3
1.2Komposisi Penduduk dan Tantangan Menghadapi Bonus Demografi	6
1.3Usia Wanita Kawin Pertama dan KB sebagai Kontrol Angka Kelahiran .	9
BAB 2 CAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN	13
2.1Perkembangan Capaian Pendidikan	16
2.2Kemampuan Membaca dan Menulis Perempuan Lebih Rendah dibandingkan dengan Laki - Laki	21
2.3Sarana dan Prasarana Pendidikan Ditingkatkan.....	24
BAB 3 TANTANGAN BIDANG KESEHATAN	27
3.1Morbiditas sebagai Gambaran Resistensi Masyarakat	29
3.3Kesehatan Bayi	31
3.4Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	33
BAB 4 KONDISI KETENAGAKERJAAN	39
4.1Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	41
4.2Lapangan Usaha Pertanian Mendominasi Penyerapan Tenaga kerja	44
4.3Potret Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan	46
4.4Peranan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penciptaan Lapangan kerja	48
BAB 5 POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA	51
5.1Pola Konsumsi Masyarakat	53

BAB 6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	57
6.1Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal	60
6.2Fasilitas Rumah Tinggal	65
BAB 7 POTRET KEMISKINAN	69
7.1Perkembangan Penduduk Miskin	71
7.2 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Perdesaan Lebih tinggi....	73
7.3Karakteristik Pendidikan dan Ketenagakerjaan Penduduk Miskin	74
BAB 8 INDIKATOR SOSIAL LAINNYA.....	77
8.1 Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Menjadi Kebutuhan primer ..	79
8.2Perjalanan Wisata sebagai Bagian dari Gaya Hidup	83
8.3Tindak Kejahatan Masih Perlu Diwaspadai	84
8.4Kredit Usaha Menggerakkan Ekonomi Masyarakat	85
Daftar Pustaka	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2017	4
Tabel 1.2.	Persebaran dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	5
Tabel 1.3.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Umur di Kabupaten Kuantan Singingi , 2017	7
Tabel 1.4.	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2013 - 2017	8
Tabel 2.1.	Jumlah Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2015 -2017	25
Tabel 2.2.	Rasio Murid terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2016 -2017	26
Tabel 3.1.	Persentase Anak Usia kurang dari 2 tahun yang Pernah diberi ASI dan Lamanya Pemberian ASI, 2016 -2017	32
Tabel 3.2.	Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan yang Pernah Melakukan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Kuantan Singingi, 2016 -2017	33
Tabel 3.3.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 ..	35
Tabel 3.4.	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017.....	36
Tabel 4.1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2015 dan 2017	42
Tabel 6.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	65
Tabel 7.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi , 2013 –2017	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Piramida Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	6
Gambar 1.2.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	10
Gambar 1.3.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	11
Gambar 1.4.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Melaksanakan KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	12
Gambar 2.1.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2013-2017 (Tahun)	17
Gambar 2.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	19
Gambar 2.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	21
Gambar 2.4.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Apakah dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	23
Gambar 2.5.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Apakah Tidak dapat Membaca dan Menulis Huruf Apapun di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	23
Gambar 3.1.	Persentase Penduduk Menurut Apakah Mempunyai Keluhan Kesehatan Dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	30
Gambar 3.2.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 .	34
Gambar 3.3.	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	37
Gambar 3.4.	Persentase Penduduk yang Menjalani Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	38
Gambar 4.1.	Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 (Agustus)	43

Gambar 4.2.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 (Periode Agustus)	45
Gambar 4.3.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 (Periode Agustus).....	47
Gambar 4.4.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 (Periode Agustus).....	48
Gambar 5.1.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	54
Gambar 5.2.	Persentase Perbandingan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2016 dan 2017	55
Gambar 6.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	60
Gambar 6.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Per Kapita di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	62
Gambar 6.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	63
Gambar 6.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	64
Gambar 6.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	64
Gambar 6.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	67
Gambar 6.7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017	68
Gambar 7.1.	Jumlah & Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi, 2012-2017	72
Gambar 7.2.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kuantan Singingi 2017	74
Gambar 7.3.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Kuantan Singingi 2017	75

- Gambar 8.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Beberapa Akses Terhadap TIK di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 81
- Gambar 8.2. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut untuk Apa Saja Mengakses Internet di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017..... 82
- Gambar 8.3. Persentase Penduduk Menurut Apakah Bepergian dalam 1 Tahun Terakhir, Kabupaten Kuantan Singingi 2017 83
- Gambar 8.4. Persentase Penduduk Menurut Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan, Kabupaten Kuantan Singingi 2017 85
- Gambar 8.5. Persentase Rumah Tangga Mendapatkan Kredit Usaha Selama 1 Tahun terakhir , Kabupaten Kuantan Singingi 2017..... 86

A top-down view of a dark wood-grain table. In the upper left, a small chalkboard with a wooden frame has 'BAB 1' written in white chalk. To its right is a white coffee cup on a saucer. Below the chalkboard is a vintage camera and several Polaroid-style photos. The text 'KARAKTERISTIK PENDUDUK' is printed in large white letters on the right side of the table.

BAB 1

KARAKTERISTIK PENDUDUK

KARAKTERISTIK PENDUDUK

Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini adalah penduduk, memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu wilayah negara. Selain sebagai pelaku dalam pembangunan, penduduk juga sebagai tujuan akhir dari suatu pembangunan. Oleh sebab itu, penataan dan pengembangan yang berkaitan erat dengan penduduk harus direncanakan dengan matang.

Dalam proses perencanaan pembangunan, data dan informasi kependudukan menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Perkembangan penduduk perlu dicermati, baik dari sisi jumlah maupun karakteristik lainnya, seperti komposisi dan distribusinya. Data yang dapat dimanfaatkan tidak hanya kondisi saat ini, akan tetapi kondisi masa lampau dan proyeksi masa yang akan datang juga sangat diperlukan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Data kependudukan sangat dibutuhkan hampir di semua rencana program pembangunan. Setiap kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat mempertimbangkan karakteristik masyarakat itu sendiri.

1.1 Perkembangan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 adalah 321.216 jiwa, atau mengalami pertumbuhan sekitar 1,03 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 164.769 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 156.447 jiwa. Rasio jenis kelamin sebesar 105. Artinya, dari sebanyak 100 jiwa penduduk perempuan maka ada sebanyak 105 jiwa penduduk laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Tabel 1.1 Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi
Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012-2017**

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2012	155 523	147 108	302 631	106	2,77
2013	157 597	149 121	306 718	106	1,35
2014	159 480	151 139	310 619	106	1,27
2015	161 377	152 899	314 276	106	1,18
2016	163 213	154 722	317 935	105	1,16
2017	164 769	156 447	321 216	105	1,03

Sumber: Proyeksi Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan papan. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi secara umum. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk yang akan mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Program KB dirancang untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil yang bahagia sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, kepadatan penduduk di Kuantan Singingi mencapai 86 jiwa per km². Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk di suatu wilayah. Ditinjau di masing-masing daerah, diketahui bahwa

terjadi ketimpangan kepadatan penduduk antar kecamatan. Kepadatan penduduk terpusat di daerah ibukota kabupaten yang memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk untuk bekerja atau menetap. Dalam hal ini, Teluk Kuantan sebagai ibukota kabupaten dan Sentajo Raya yang dekat dengan ibukota kabupaten memiliki kepadatan yang paling tinggi, mencapai 179 dan 198 jiwa per km², sedangkan satu-satunya kecamatan yang kepadatan penduduknya dibawah 15 adalah Kecamatan Pucuk Rantau dengan kepadatan 13 jiwa per km².

**Tabel 1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Kuantan Singingi , 2017**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantan Mudik	24 163	564,28	43
Hulu Kuantan	8 869	384,40	23
Gunung Toar	13 956	165,25	84
Pucuk Rantau	10 804	821,64	13
Singingi	31 822	1 953,66	16
Singingi Hilir	38 424	1 530,97	25
Kuantan Tengah	48 368	270,74	179
Sentajo Raya	28 838	145,70	198
Benai	16 363	124,66	131
Kuantan Hilir	15 249	148,77	103
Pangean	18 870	145,32	130
Logas Tanah Darat	20 843	380,34	55
Kuantan Hilir Seberang	13 364	114,29	117
Cerenti	15 458	456,00	34
Inuman	15 825	450,01	35
KUANTAN SINGINGI	321 216	3 714,19	86

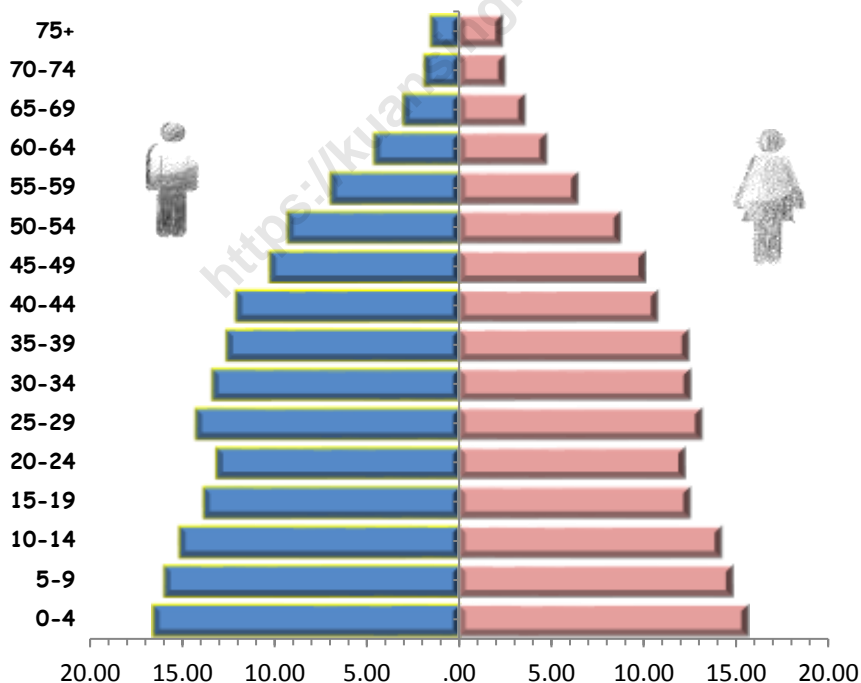
Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2018

Kepadatan penduduk yang berlebihan akan dihadapkan pada masalah-masalah sosial ekonomi, seperti masalah keterbatasan lahan pemukiman, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Masalah lapangan pekerjaan ini akan berimbas pada tingkat pengangguran yang tinggi apabila tidak dapat menampung angkatan kerja yang ada.

1.2 Komposisi Penduduk dan Tantangan Menghadapi Bonus Demografi

Dari jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 321.216 jiwa, sebanyak 28,73 persen penduduk berada pada kelompok 0-14 tahun, sebanyak 66,60 persen berada pada kelompok 15-64 tahun, dan sisanya 4,66 persen pada kelompok 65 tahun keatas.

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber : Proyeksi Penduduk 2017

Piramida penduduk Kabupaten Kepulauan Kuantan Singingi tahun 2017 merupakan piramida penduduk muda (Expansive) berbentuk limas. Jumlah penduduk

usia produktif (15-64 tahun) lebih mendominasi jika dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (usia 15 tahun ke bawah dan usia 65 tahun ke atas).

Komposisi penduduk menurut umur bermanfaat untuk mengetahui distribusi penduduk usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan lansia (65 tahun ke atas). Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbang oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif dapat menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumah tangga secara mikro. Berbeda dengan pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbang oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif biasanya karena faktor banyaknya migrasi pencari kerja yang masuk.

Tabel 1.3.
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Umur di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Umur	Jumlah	Pesentase
(1)	(2)	(3)
0 – 14 tahun	92 296	28,73
15 – 64 tahun	213 943	66,60
65+ tahun	14 977	4,66
Jumlah	321 216	100,00
Angka Beban Ketergantungan (persen)	50,14	

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin kecil menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif. Pada tahun 2017, angka beban ketergantungan Kuantan Singingi sebesar 50,14. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 1.4 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2013-2017

Tahun	0-14 Tahun (persen)	15-64 Tahun (persen)	65+ Tahun (persen)	Angka Beban Ketergantungan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=[(2)+(4)]/(3)*100
2013	30,06	65,84	4,10	51,88
2014	29,74	66,05	4,21	51,40
2015	29,42	66,24	4,34	50,98
2016	29,08	66,42	4,49	50,55
2017	28,73	66,60	4,66	50,14

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau, 2010-2020

Selama lima tahun terakhir, angka beban ketergantungan ini menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 51,88 pada tahun 2013 menjadi 50,14 pada tahun 2017. Angka beban ketergantungan 50 ke bawah merupakan indikasi bahwa suatu daerah berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*). Kesempatan ini sebagai dampak positif adanya bonus demografi (*demographic dividend*), yaitu bonus yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.

Sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Keuntungan bonus demografi dari sisi perekonomian tentu akan membuka peluang peningkatan perekonomian melalui peningkatan pendapatan. Ilustrasinya, dalam suatu rumah tangga terdapat 2 anggota rumah tangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) dan satu anggota rumah tangga yang tidak produktif, anak di bawah 15 tahun misalnya. Jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan *saving* (menabung) atau melakukan investasi sumber daya manusia (*human capital*) yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi

tadi ataupun bagi anaknya. Investasi *human capital* misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

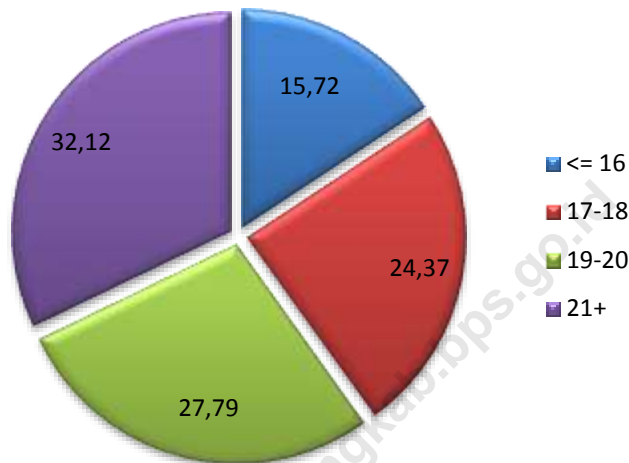
Jendela peluang (*windows of opportunity*) ini tidak boleh disia-siakan, harus disertai dengan peningkatan kesempatan lapangan kerja. Salah satunya dengan menggenjot lapangan usaha yang belum maksimal dan memacu perkembangan UMKM untuk menyerap angkatan kerja yang berlimpah.

1.3 Usia Wanita Kawin Pertama dan KB sebagai Kontrol Angka Kelahiran

Pembahasan mengenai pertumbuhan penduduk tidak lepas dari angka kelahiran. Angka kelahiran dipengaruhi oleh masa reproduksi perempuan. Semakin panjang masa reproduksi, maka kemungkinan jumlah anak yang dilahirkan semakin banyak. Masa reproduksi perempuan dapat dihitung dari usia kawin pertama. Di Kuantan Singingi, pada tahun 2017 masih terdapat 15,72 persen penduduk perempuan berumur 10 Tahun ke Atas yang pernah kawin pada umur perkawinan pertama dibawah 16 tahun.

Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda dalam proses perkembangan janin atau karena belum siap mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Gambar 1.2.
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

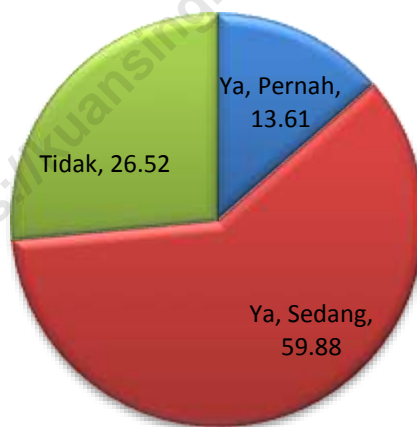


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2017

Di Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2017 persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin dengan usia kawin pertama diatas 21 tahun masih sebesar 32,12 persen. Sementara sisanya, 67,88 persen perempuan pernah kawin dengan usia perkawinan pertama di bawah 21 tahun. Perkawinan di bawah usia 21 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental, sosial, dan ekonomi belum siap dan biasanya belum mapan. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama pula masa reproduksinya. Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah.

Selain pendewasaan usia kawin pertama, cara lain yang efektif dalam mengendalikan angka kelahiran yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang memiliki berbagai macam jenisnya. Pemerintah mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk partisipasi KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan lagi.

Gambar 1.3.
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Kuantan Singingi 2017



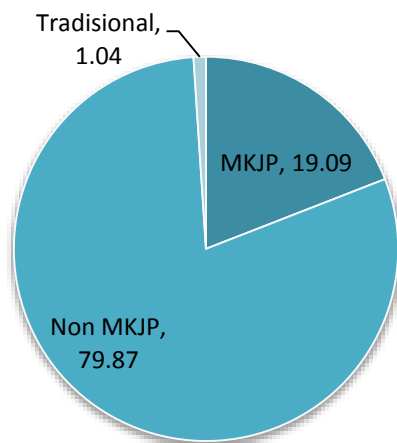
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2017

Pada tahun 2017, persentase penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kuantan Singingi, 59,88 persen diantaranya sedang menggunakan KB dan masih terdapat 26,52 persen yang tidak ber-KB. Dari jumlah perempuan yang tidak ber-KB tersebut sebanyak 1,51 persen karena tidak tahu, 4,64 persen tidak setuju KB, dan 26,95 persen takut efek samping.

Alasan semacam ini harus menjadi perhatian bersama untuk terus mensosialisasikan program KB, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan, manfaat, pencegahan efek samping, dan hal hal lain terkait KB lainnya.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua, yaitu MKJP dan Non MKJP (Sementara). MKJP atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang meliputi Tubektomi/MOW, Vasektomi/MOP, IUD dan Susuk KB/Implan. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu. Beberapa hal dapat menjadi bahan pertimbangan seseorang memilihi alat KB, seperti faktor keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, keterjangkauan harga, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efektif, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai, dan faktor kenyamanan bagi penggunaannya. Di Kuantan Singingi terdapat 19,09 persen penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang ber KB menggunakan alat kontrasepsi MKJP dan 79,87 persen menggunakan alat kontrasepsi Non MKJP (Sementara),serta 1,04 persen masih menggunakan alat kontrasepsi Cara Tradisional

Gambar 1.4.
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Sedang Melaksanakan KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi di Kabupaten Kuantan Singingi 2017



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

A top-down view of a wooden desk. On the left, a small chalkboard with a wooden frame has 'BAB 2' written in white chalk. To its right is a white coffee cup on a saucer. Below the coffee is a small Polaroid photo of a person. Further down is a vintage camera. To the left of the camera are several other Polaroid photos, one showing a blue landscape and another showing a yellow object. The text 'CAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN' is printed in large white letters on the right side of the desk.

BAB 2

CAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN

CAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui modal sumber daya manusia. Dalam tulisan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Presiden Bank Dunia menyampaikan bahwa salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara, yaitu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Pendidikan memiliki arti yang luas, baik pendidikan dalam arti formal maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas modal manusia. Peningkatan pendidikan seseorang dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan yang banyak, maka semakin tinggi produktivitasnya dan berimbang pada perekonomian nasional akan tumbuh lebih tinggi. Hal yang senada juga tampak pada kajian Bank Dunia yang membandingkan selama 25 tahun bahwa 20 negara yang lebih fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia memiliki korelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan tingkat pendapatan.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat gencar melaksanakan berbagai macam program pembangunan pendidikan, salah satunya melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN. Diharapkan dengan besarnya anggaran tersebut dapat menghasilkan anak-anak yang mampu mendapatkan proses belajar yang efektif dan unggul, sehingga bisa menyiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh kesempatan dan tantangan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, diharapkan pembangunan nasional dapat lebih terjamin dan mampu memajukan

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu misi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masalah pemerataan pendidikan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019.

Di Kuantan Singingi, pendidikan juga menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Salah satu misi pemerintah daerah Kuantan Singingi yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Kuantan Singingi yang sehat, cerdas, dan produktif.

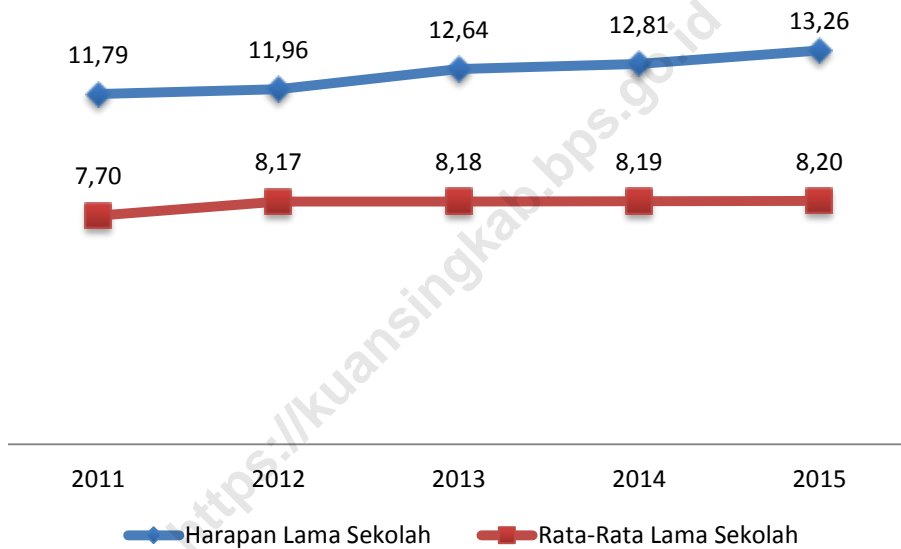
2. 1 Perkembangan Capaian Pendidikan

Capaian pendidikan penduduk dapat diukur dengan banyak indikator, salah satunya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) (*expected years of schooling*) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (*mean years of schooling*). Kedua indikator ini pula yang digunakan sebagai pengukur dimensi pendidikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah. Pada tahun 2017, HLS Kuantan Singingi telah mencapai 13,26 tahun, setara dengan pendidikan D2. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini terus menunjukkan kenaikan. Cepat lambatnya pertumbuhan angka ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak jika ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika suatu tahapan dalam pendidikan tidak berjalan semestinya, atau jika ada kebijakan yang membuka peluang partisipasi sekolah namun tidak lagi bertahan, maka dimungkinkan terjadinya penurunan angka HLS. Satu yang harus diingat bahwa indikator pendidikan mengukur

manusianya. Pendidikan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebab manusia itu kompleks. Tanpa ada kemauan dari pribadi seseorang untuk meningkatkan taraf pendidikannya, segala fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebaik apapun itu, tidak akan memberikan dampak yang berarti.

Gambar 2.1.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2013-2017 (Tahun)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS Kuantan Singingi pada tahun 2017 telah mencapai

8,20 tahun, setara dengan sedang mengenyam bangku kelas 3 SMP. Sama halnya dengan HLS, RLS Kuantan Singingi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

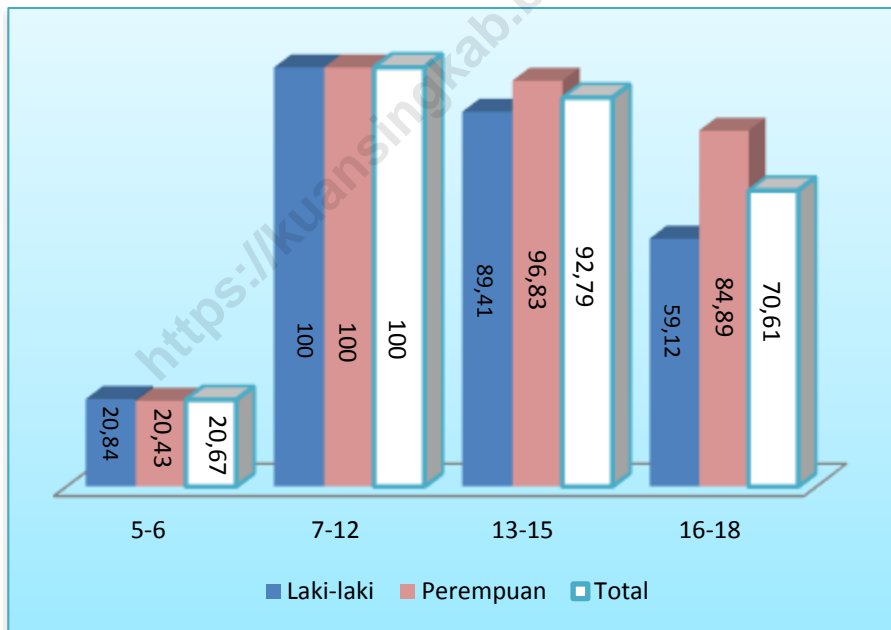
Secara umum, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kuantan Singingi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari besarnya, tercatat angka harapan lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menjadi wajar, mengingat bahwa dari tahun ke tahun kualitas pendidikan terus ditambah dan diperbaharui, terutama pada kelompok pendidikan dasar. Upaya ini juga meningkatkan partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Semakin tinggi partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas, maka harapan lama sekolah akan semakin panjang. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menunjukkan masa pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Seperti yang diketahui bahwa keterjangkauan pendidikan pada masa silam tidak semudah saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah pada tahun-tahun tersebut, sehingga rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun masih relatif rendah.

Pemerintah Indonesia bersama dengan dunia internasional telah berkomitmen untuk mencapai target SDGs dalam bidang pendidikan yaitu 'menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua'. Adapun target yang ingin dicapai yaitu menjamin semua anak di wilayah Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, sampai tahun 2030 dapat menyelesaikan SD-SMP. Dalam prosesnya, hingga tahun 2017 capaian tersebut dapat dilihat berdasarkan angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah ini juga merupakan salah satu indikator capaian pendidikan selain HLS dan RLS. Tingkat partisipasi sekolah mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Beberapa ukuran tingkat partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur

tersebut. Semakin besar APS, maka akan semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah. APK menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada usia tertentu. APK dapat bernilai di atas 100 karena terdapat penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu di luar kelompok usia yang seharusnya. Umumnya, hal ini terjadi pada jenjang pendidikan SD karena adanya anak yang belum mencukupi umur 7 (tujuh) tahun yang sudah bersekolah. Sementara itu, APM menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu.

Gambar 2.2.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



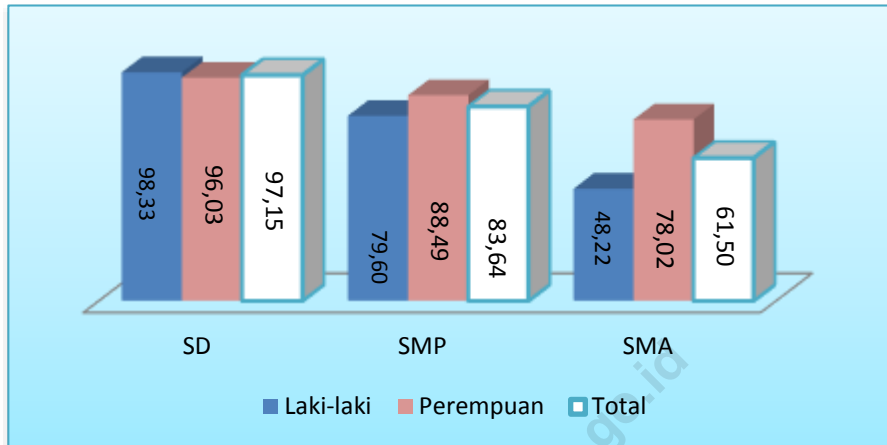
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017

Secara umum, APS Kuantan Singingi pada tahun 2017 sudah cukup baik, khususnya pada level pendidikan menengah yang masih mencapai 92,79 persen. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah terus mengupayakan agar setiap warga negara dapat menikmati pendidikan dasar hingga

sembilan tahun. Sementara itu, nilai APS jenjang usia 16-18 tahun masih 70,61 persen. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan APS jenjang usia di bawahnya. Hal ini disebabkan banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan APS pada jenjang usia ini masih perlu ditingkatkan. Jika diperhatikan, semakin meningkat jenjang usia, nilai APS semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini sangat sayangkan, mengingat upaya pendidikan ini ditujukan untuk mencetak SDM yang berpendidikan tinggi dan unggul agar dapat bersaing dalam skala global, termasuk untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN.

APS dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses pendidikan. Akan tetapi, informasi yang digambarkan oleh APS ini tidak memperhitungkan anak pada kelompok yang bersekolah pada jenjangnya. Contohnya, APS pada jenjang usia 13-15 mengabaikan anak usia 15 tahun yang sudah bersekolah SMA/ sederajat. Untuk menggambarkan partisipasi sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, maka dapat menggunakan indikator APM

Gambar 2.3.
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017

Pola APM di Kuantan Singingi hampir sama dengan dengan pola APS dimana angka tertinggi berada pada jenjang SD/Sederajat, sebesar 97,15 persen. Kemudian semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APM semakin rendah, yaitu 83,64 persen pada jenjang SMP/Sederajat dan 61,50 persen pada jenjang SMA/Sederajat. Rendahnya APM jenjang SMP/Sderajat dan SMA/Sederajat menunjukkan bahwa masih banyaknya anak usia 13-15 tahun yang belum merasakan pendidikan SMP/Sederajat dan anak usia 16-18 tahun yang belum merasakan pendidikan jenjang SMA/Sederajat.

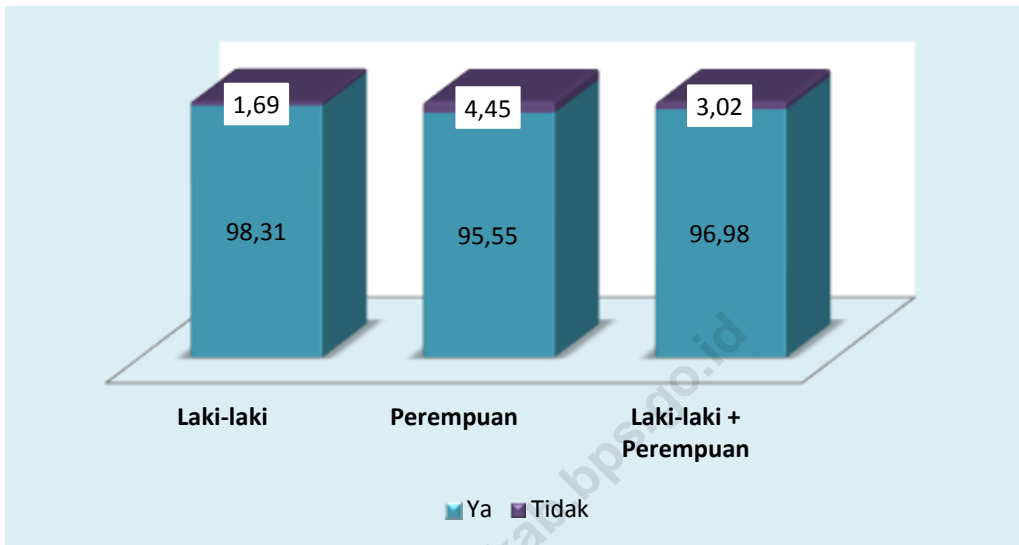
2.2 Kemampuan Membaca dan Menulis Perempuan Lebih Rendah Dibandingkan dengan Laki-laki

Membaca dan menulis merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang luas. Dengan kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat menjangkau ilmu pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa karena sebagian besar aspek kehidupan manusia membutuhkan kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena itu, kemampuan baca-tulis penduduk dewasa dapat dijadikan sebagai ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan.

Angka Melek Huruf (*literacy rate*) menjadi salah satu indikator dasar untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis. Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. Ukuran angka melek ini diukur pada penduduk usia 15 tahun keatas karena pada usia tersebut dianggap sebagai masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis.

Secara umum, angka melek huruf Kabupaten Kuantan Singingi sudah tinggi. Sudah 97,93 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis huruf. Apabila dilihat dari kemampuan menguasai huruf latin, sebanyak 96,98 persen penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu membaca dan menulis huruf latin/alfabet. Uniknya, apabila ditelaah di setiap kemampuan menguasai huruf menurut jenis kelamin, tampak bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Seperti yang tercatat pada kemampuan membaca dan menulis huruf latin/alfabet, dimana persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang menguasai huruf-huruf tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Secara tidak langsung hal tersebut menyiratkan bahwa kemampuan membaca dan menulis perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Sebenarnya, hal ini cukup disayangkan mengingat bahwa perempuan sebagai Ibu maupun calon Ibu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Seorang Ibu diharapkan dapat menjadi guru yang akan mengajari dan mendidik anak. Salah satu contoh sederhana mengapa ibu harus dapat membaca dan menulis yaitu untuk mengetahui standar gizi yang seimbang bagi anak. Hal semacam itu dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan melalui membaca dan menulis karena mencari tahu tentang bagaimana mendidik anak yang baik tidak hanya sekedar asal mengikuti pemikiran dan paradigma lama tentang bagaimana seharusnya mendidik anak.

Gambar 2.4.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Apakah dapat Membaca dan Menulis Huruf Latin di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017

Gambar 2.5.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Apakah Tidak Dapat Membaca dan Menulis Huruf Apapun di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2017

2.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan Ditingkatkan

Salah satu sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mencapai misinya untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Kuantan Singingi yang sehat, cerdas, dan produktif yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Adapun beberapa arah kebijakan diantaranya yaitu penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas yang semakin baik, penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah.

Perbaikan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan pendidikan. Masalah yang masih terjadi saat ini yaitu tidak meratanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, akses pendidikan berkualitas yang merata menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan.

Pada tahun ajaran 2017, jumlah sekolah di Kuantan Singingi untuk jenjang SD/ sederajat sebanyak 269 unit sekolah. Dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Kuantan Singingi sebanyak 229, dapat diasumsikan bahwa rata-rata di satu desa/kelurahan memiliki minimal satu atau dua fasilitas Sekolah Dasar. Dengan tersedianya Sekolah Dasar di setiap desa, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi untuk sekolah dengan jarak yang relatif lebih dekat dari tempat tinggal. Sementara itu, jumlah sekolah untuk jenjang SMP/Sederajat sebanyak 100 unit, dan untuk jenjang SMA/SMK sederajat sebanyak 44 unit sekolah. Secara umum, jumlah sekolah di Kuantan Singingi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama di jenjang SD/Sederajat dan SMP/Sederajat. Semakin banyaknya jumlah sekolah ini diharapkan semakin banyak menampung siswa sehingga akan meningkatkan partisipasi sekolah. Tidak hanya itu, keberadaan sekolah ini juga harus didukung oleh akses transportasi yang mudah dan murah bagi masyarakat sehingga keberadaan sekolah ini mudah dijangkau.

Tabel 2.1.
Jumlah Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi, 2015 - 2017

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat	263	268	269
SMP/Sederajat	94	97	100
SMA/Sederajat	32	32	32
SMK/Sederajat	12	12	12

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi

Selain keberadaan sekolah, indikator lain yang menggambarkan kualitas pendidikan yang baik yaitu peranan guru dimana dalam proses pembelajaran guru sebagai pendidik memiliki peranan yang sangat krusial. Seorang guru harus mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik sehingga peserta didik mampu menyerap ilmu yang diberikan, menjadi teladan yang baik, dan mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Pentingnya peranan guru menjadikan posisi guru menjadi titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan.

Rasio murid terhadap guru dapat menggambarkan kapasitas mengajar per satu guru. Secara umum, rasio murid terhadap guru di Kuantan Singingi cukup baik. Pada tahun ajaran 2017, kapasitas mengajar setiap guru hanya sekitar 10-13 murid dalam setiap jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa beban mengajar setiap guru tidak terlalu tinggi sehingga diharapkan terciptanya pemanfaatan guru yang lebih efisien. Namun, bukan berarti semakin kecil nilai rasionya maka akan semakin baik. Apabila nilai rasio terlalu kecil, maka akan terjadi inefisiensi pemanfaatan guru yang tersedia. Masalah guru tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, akan tetapi distribusinya juga harus diperhatikan. Selain itu, harus juga diimbangi dengan kualitas guru yang baik untuk dapat mencetak generasi penerus bangsa yang baik pula.

Tabel 2.2.
Rasio Murid terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kuantan Singingi, 2016 - 2017

Jenjang Pendidikan	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
TK	12	11
SD	12	13
SMP	9	10
SMA	11	11
SMK	8	10

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka, 2018 (diolah)

A top-down view of a dark wood-grain desk. In the upper left, a small chalkboard with a wooden frame has 'BAB 3' written in white chalk. To its right is a white coffee cup on a saucer. Below the coffee is a small vertical Polaroid photo of a green plant. In the lower left, there is a vintage silver camera and several other Polaroid photos: one of a blue ocean, one of a yellow square, and a partially visible one of a blue sky. The main title is centered in the lower half of the image.

BAB 3

TANTANGAN BIDANG KESEHATAN

TANTANGAN BIDANG KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi salah satu dimensi yang digencarkan pembangunannya oleh pemerintah. Dalam tulisan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Presiden Bank Dunia menyampaikan bahwa salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara, yaitu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia selain melalui pendidikan, juga melalui bidang kesehatan. Dalam Human Resources Summit, beliau menyampaikan bahwa sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan cerdas juga menjadi perhatian pemerintah saat ini. Selain mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN, pemerintah juga memberikan lima persen APBN untuk kesehatan. Diharapkan dengan besarnya anggaran tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan sehat, maka sehingga dapat turut aktif dalam pembangunan nasional.

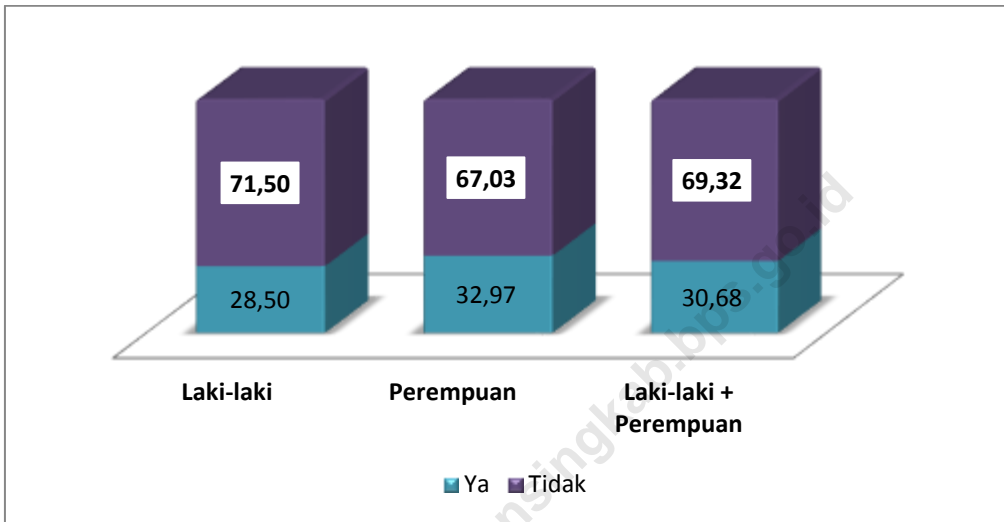
3.1 Morbiditas sebagai Gambaran Resistensi Masyarakat

Morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Morbiditas ini dapat menjadi salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk secara umum. Semakin kecil angka morbiditas berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah.

Pada tahun 2017 di Kuantan Singingi setidaknya terdapat 30,68 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 26,40 persen. Meningkatnya persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ini merupakan salah satu tanda menurunnya tingkat kesehatan masyarakat di Kuantan Singingi pada tahun 2017. Apabila penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ini semakin banyak, itu berarti masyarakat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang timbul akibat melemahnya resistensi.

Kondisi kesehatan yang buruk selanjutnya akan berpengaruh terhadap usia harapan hidup dan mortalitas.

Gambar 3.1.
Persentase Penduduk Menurut Apakah Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Fakta lain menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir sebesar 32,97 persen, lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yang sebesar 28,50 persen. Secara tidak langsung, kondisi ini memberikan *warning* kepada perempuan untuk lebih menjaga kesehatan.

Selanjutnya, dari 30,68 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu di Kuantan Singingi tahun 2017, sebanyak 63,71 persen diantaranya tidak melakukan berobat jalan. Adapun alasan utama tidak berobat jalan sebagian besar karena melakukan pengobatan sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa keluhan kesehatan yang dialami tidak terlalu parah sehingga masih dapat dilakukan penyembuhan sendiri.

Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan, sebanyak 13,79 persen telah menggunakan jaminan kesehatan, sedangkan sisanya,

86,21 persen, tidak menggunakan jaminan kesehatan. Terkait jaminan kesehatan, pemerintah telah mengupayakan program jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Kesehatan yang diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.2 Kesehatan Bayi

Persoalan kesehatan masyarakat, tidak akan lepas pada tingkat kesehatan balita. Bayi sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya dijamin gizi dan kesehatannya agar bisa tumbuh menjadi sumber daya manusia di masa depan yang berkualitas. Mencetak anak-anak menuju masa depan yang sehat dan cerdas dimulai dari pertumbuhan awal mereka sejak bayi.

Salah satu faktor penentu kesehatan bayi yaitu dari apa yang dikonsumsi. ASI menjadi makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI merupakan gizi yang sempurna bagi bayi. Menurut WHO, ASI terbukti mengandung antibodi yang dapat melindungi bayi dari diare dan pneumonia, dua penyebab utama kematian anak di dunia. Selain sebagai daya tahan tubuh bagi bayi, ASI juga dapat melindungi bayi dari *gastroenteritis* (peradangan perut dan usus), penyakit pernapasan, infeksi telinga, dan meningitis. Selain melindungi semasa anak-anak, ASI juga memiliki manfaat jangka panjang. Bayi yang mendapatkan ASI memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, dan penyakit radang usus ketika dewasa. Besarnya manfaat ASI bagi ibu dan anak, hingga WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pada bayi. Setelah masa tersebut, bayi dapat diberikan makanan pendamping secara bertahap. ASI disarankan dilanjutkan hingga bayi usia menginjak dua tahun.

Kesadaran ibu untuk memberikan ASI sangat diperlukan demi generasi yang tahan terhadap penyakit ke depannya. Tentu saja dukungan seorang ayah juga tak kalah pentingnya untuk meningkatkan persentase anak yang mengkonsumsi ASI hingga usia 2 tahun.

Tabel 3.1.
Persentase Anak Usia kurang dari 2 tahun yang Pernah Diberi ASI dan Lamanya Pemberian ASI, 2016-2017

Tahun	Indikator	
	Anak Baduta yang Pernah diberi ASI (%)	Rata-rata lama pemberian ASI (Bulan)
(1)	(2)	(3)
2016	92,20	10,03
2017	93,42	11,03

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Di Kuantan Singingi pada tahun 2017, sudah 93,42 persen bayi usia kurang dari dua tahun telah diberi ASI. Rata-rata lama pemberian ASI di KUANTAN SINGINGI 2017 selama 11 bulan, telah melewati masa ASI eksklusif. Artinya, secara umum, sebagian besar bayi di Kuantan Singingi telah memperoleh ASI eksklusif, meskipun tidak dilanjutkan hingga dua tahun.

Persoalan selanjutnya yaitu tentang pemberian imunisasi pada balita. Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Kementerian kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang memperoleh imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

Tabel 3.2.
Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan yang Pernah Melakukan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Kuantan Singingi, 2016 - 2017

Jenis Imunisasi	2016	2017
(1)	(2)	(3)
BCG	89,23	85,96
DPT	77,02	79,45
Polio	85,80	87,49
Campak/Morbili <i>Measles</i>	70,27	65,41
Hepatitis B	76,56	67,20

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Persentase penduduk berumur 0-59 bulan yang sudah diberikan imunisasi lengkap di Kuantan Singingi sudah mencapai lebih dari 50 persen. Hal ini sangat penting mengingat imunisasi ini sangat penting mencegah berbagai macam penyakit, wabah, cacat, kematian akibat penyakit berbahaya.

3.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan juga harus diupayakan dengan mutu dan kualitas yang baik. Tidak hanya dari sisi ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauannya juga harus diupayakan agar adil dan merata.

Pada tahun 2017, Kuantan Singingi telah memiliki fasilitas rumah sakit. Jumlah rumah sakit di Kuantan Singingi sebanyak 2 unit, keduanya berada di Kota Teluk Kuantan. Selain itu, ketersediaan puskesmas, poliklinik, dan puskesmasling juga menjadi pendukung untuk menjangkau masyarakat di level kecamatan dan desa. Di

Kuantan Singingi, jumlah poliklinik sebanyak 31 unit, puskesmas sebanyak 25 unit dan posyandu sebanyak 370 unit. Dengan jumlah kecamatan yang sebanyak 15 menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu kecamatan rata-rata sudah terdapat minimal satu puskesmas. Selain itu, jumlah posyandu sebanyak 370 unit dan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 229, berarti setidaknya rata-rata terdapat minimal satu posyandu di masing-masing desa/kelurahan. Selain itu, tercatat juga Poliklinik sebanyak 31 unit, dimana paling banyak terdapat di kecamatan Kuantan Tengah.

Gambar 3.2.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Rumah Sakit	2
Poliklinik	31
Puskesmas	25
Posyandu	370

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan, selain ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan posyandu, juga diperlukan tenaga medis yang memadai. Di Kuantan Singingi pada tahun 2017 jumlah tenaga kebidanan sebanyak 510 orang, tenaga keperawatan 324 orang, Apoteker 2 orang. Selanjutnya, jumlah dokter spesialis sebanyak 19 orang, dokter umum 32 orang, dan dokter gigi 15 orang. Jumlah tenaga medis ini mengalami penambahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penambahan jumlah tenaga medis ini diharapkan terus dilakukan mengingat jumlahnya yang masih belum terpenuhi dengan cukup, begitu pula dengan fasilitas kesehatannya.

Tabel 3.3.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

Tenaga Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Tenaga Kebidanan	510
Tenaga Keperawatan	324
Apoteker	2
Dokter Umum	32
Dokter Spesialis	19
Dokter Gigi	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi

Apabila dihitung rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut masih kurang memadai. Salah satu contohnya, dengan jumlah dokter umum yang hanya 32 orang, sedangkan jumlah penduduk Kuantan Singingi sebanyak 321 ribu jiwa, berarti 1 (satu) dokter terbebani sekitar sepuluh ribu penduduk. Beban ini masih terlalu besar sehingga jumlah dokter masih perlu ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayan kesehatan di Kuantan Singingi. Selain itu, jumlah penduduk juga terus meningkat sehingga kebutuhan akan tenaga kesehatan juga akan terus meningkat.

Hal yang penting lainnya terkait fasilitas kesehatan yaitu ketersediaan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak, seperti pelayanan untuk persalinan agar dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Persalinan yang ditolong oleh tenaga terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi.

Tabel 3.4.
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017

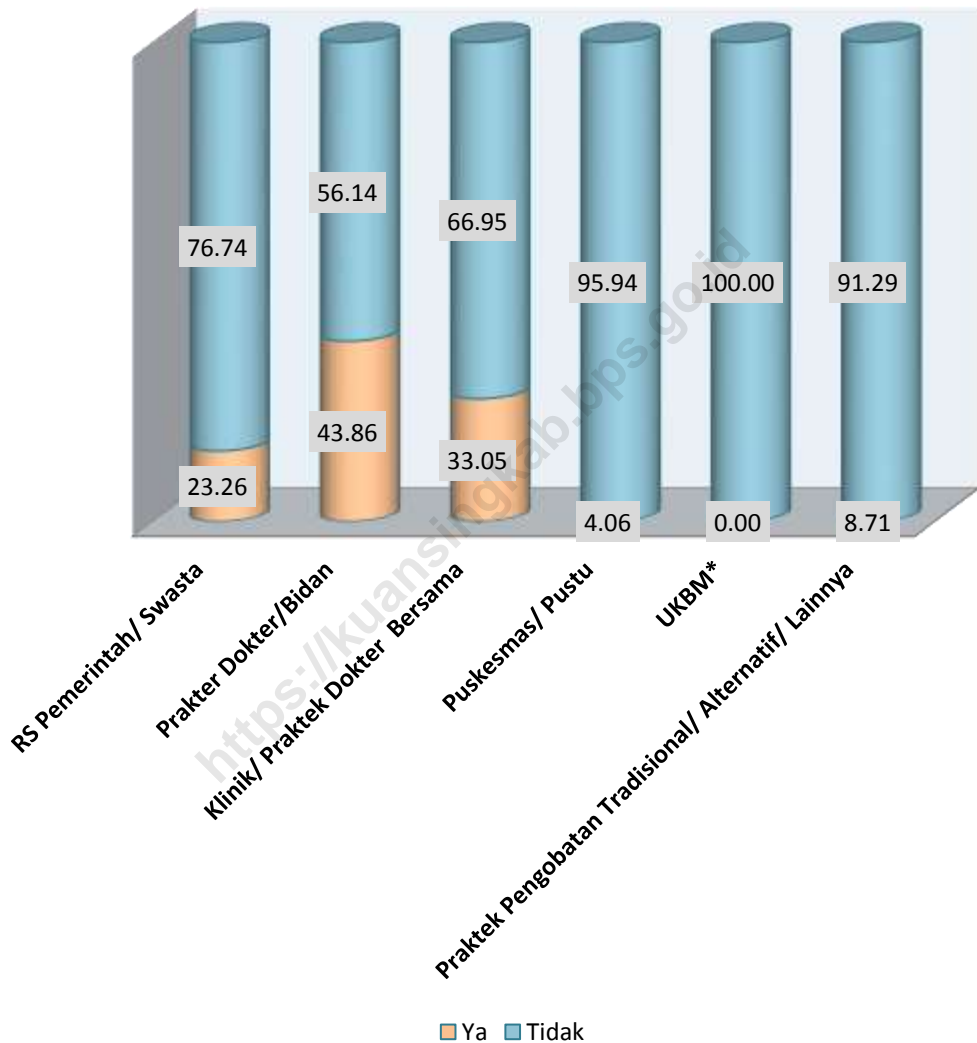
Penolong Persalinan	Nilai (Persen)
(1)	(2)
Tenaga Kesehatan	100,00
-Dokter	40,51
-Bidan	54,37
-Tenaga Kesehatan lainnya	5,12
Bukan Tenaga Kesehatan	0,00
-Dukun Tradisional	0,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Kuantan Singingi umumnya sudah memiliki pilihan untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis, terutama bidan (54,37 persen). Selain bidan, masyarakat Kuantan Singingi memilih dokter kandungan dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak yakni sekitar 40,51 persen. Adapun masyarakat yang menggunakan jasa dokter kandungan sebagian besar merupakan masyarakat perkotaan karena akses pelayanan dokter kandungan di perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan di perdesaan. Masyarakat perkotaan lebih memilih dokter kandungan karena mempertimbangkan pengetahuan kesehatan dokter kandungan yang lebih terpercaya.

Gambar 3.3.

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



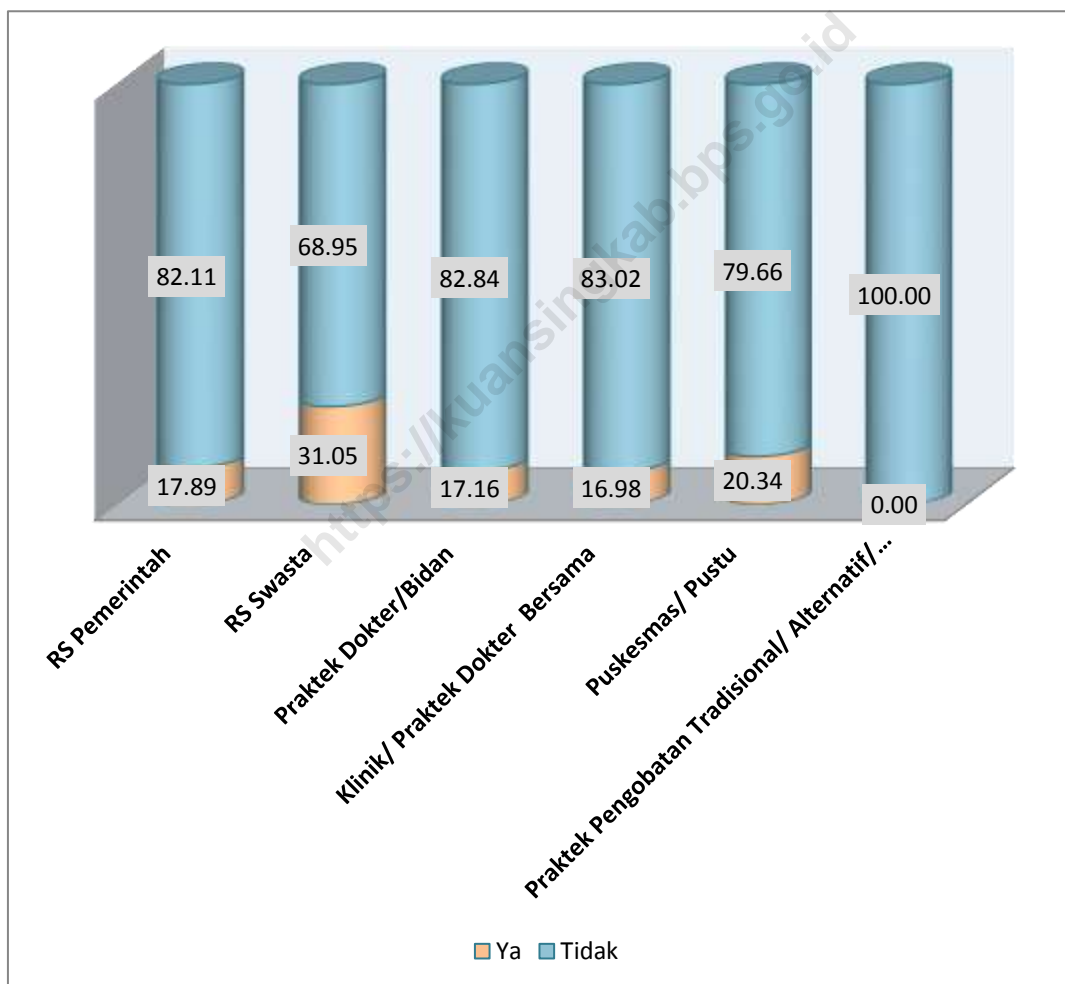
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Catatan : *) UKBM terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

Dalam hal tempat berobat jalan bagi penduduk yang menjalani pengobatan jalan, yang paling menonjol di Kuantan Singingi pada tahun 2017 adalah penduduk yang berobat ke Praktek Dokter atau Bidan dan Klinik/Praktek Dokter Bersama. Terdapat 43,86 persen penduduk yang menjalani berobat dokter pernah berobat ke praktek dokter atau bidan dan 33,05 persen ke Klinik/Praktek Dokter Bersama.

Preferensi masyarakat ini karena klinik / Praktek dokter bersama memiliki akses yang lebih mudah dijangkau. Selanjutnya, terkait pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk rawat inap, RS Swasta menjadi pilihan utama masyarakat di Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan pelayanan rumah sakit swasta yang ramah, cepat, dan sigap serta ketersediaan BPJS di RS. Swasta.

Gambar 3.4.
Persentase Penduduk yang Menjalani Rawat Inap Menurut Tempat Rawat Inap di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

A top-down view of a dark wood-grain table. On the left, a small chalkboard with a wooden frame has 'BAB 4' written in white. To its right is a white coffee cup on a saucer. Below the chalkboard is a vintage camera and several Polaroid-style photos. The text 'KONDISI KETENAGAKERJAAN' is printed in large white letters on the right side of the table.

BAB 4

KONDISI KETENAGAKERJAAN

KONDISI KETENAGAKERJAAN

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kesempatan kerja dapat menjadi salah satu akar indikator adanya proses pembangunan ekonomi. Saat ini, ketenagakerjaan masih menjadi problem nasional yang tak kunjung selesai. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pembukaan kesempatan kerja baru, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar persoalan tersebut tidak meluas dan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi terkait ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini baik untuk penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, pemanfaatan data ketenagakerjaan ini juga sangat berpotensi untuk pembangunan nasional.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia

kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kuantan Singingi pada Agustus 2017 mencapai 146.273 orang, berkurang sebanyak 3.084 orang dibanding Agustus 2015 (149.357). Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Kuantan Singingi pada Agustus 2017 mencapai 136.763 orang, berkurang sebanyak 8.712 orang dibanding keadaan Agustus 2015.

Penurunan Angkatan kerja pada periode yang sama diiringi dengan penurunan TPAK. Selama periode 2015 dan 2017, Persentase TPAK di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 3.34 prsen. Dari 67,16 persen pada Agustus 2015, menjadi 63,82 persen pada Agustus 2017. Hal ini diartikan sebagai kenaikan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja jauh lebih sedikit dibandingkan kenaikan penduduk kerja usia kerja (15 tahun ke atas)

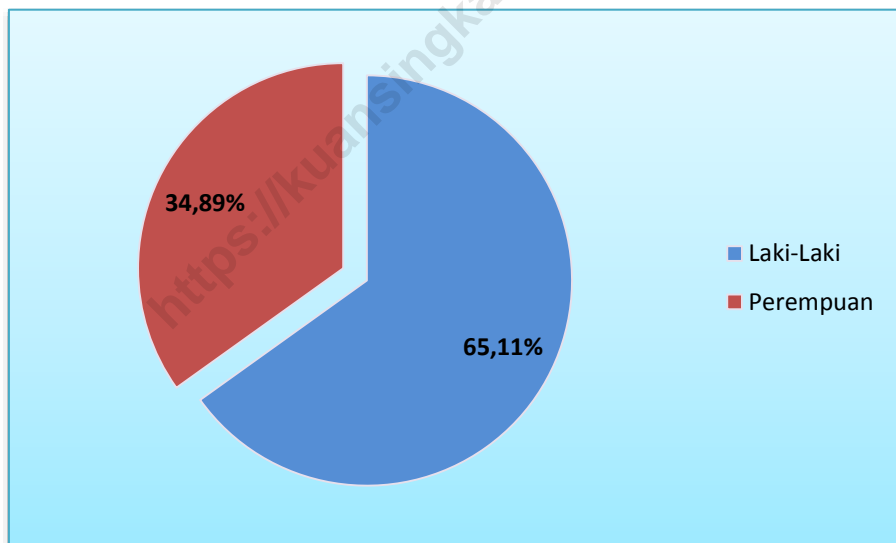
Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2015 dan 2017

Uraian	2015	2017
(1)	(2)	(3)
TPAK	67,16	63,82
TPT	2,60	6,50

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja di Kuantan Singingi masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 95.238 atau sekitar 65,11 persen dari total angkatan kerja yang ada tahun 2017. Sebaliknya, jumlah penduduk usia kerja yang bukan merupakan angkatan kerja didominasi oleh perempuan, sekitar 73,43 persen dari total penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja. Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja antara lain dipengaruhi faktor budaya dimana peran perempuan masih dituntut untuk mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bertugas untuk mencari nafkah. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga sebanyak 90,77 persen diantaranya merupakan perempuan.

Gambar 4.1
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kuantan Singingi, 2017 (Agustus)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017

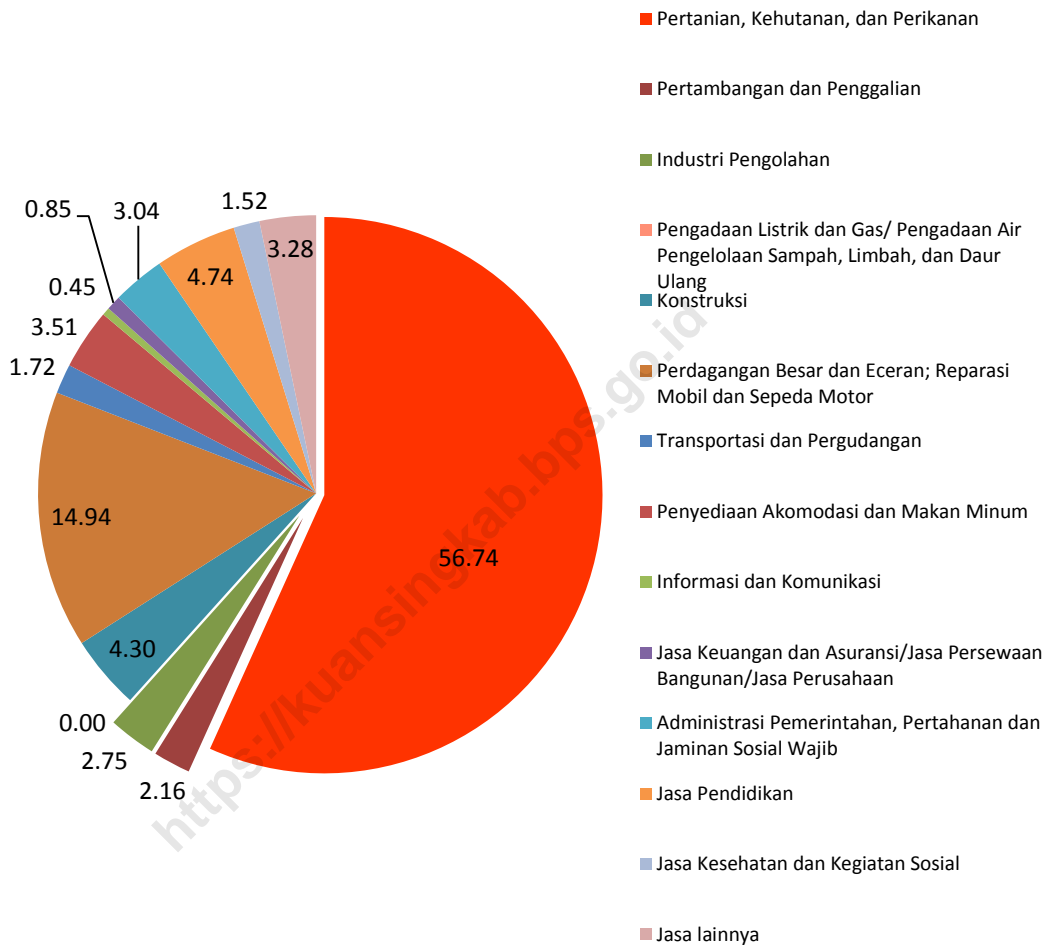
Dari seluruh angkatan kerja yang tersedia, tidak semua terserap di lapangan pekerjaan. Selain analisis angkatan kerja, dalam bidang ketenagakerjaan juga dikenal indikator pengangguran yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak

termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

4.2 Lapangan Usaha Pertanian Mendominasi Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Kuantan Singingi tersebar di seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Sebagian besar tenaga kerja di Kuantan Singingi terserap pada lapangan usaha pertanian, yaitu sekitar 77 ribu jiwa atau 56,74 persen dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2017 (periode Agustus). Kondisi ini sejalan dengan potret perekonomian di Kuantan Singingi yang memang didominasi oleh lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha pertanian ini memiliki kontribusi sekitar 49,38 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuantan Singingi. Dari sini tampak bahwa sebagai lapangan usaha yang mendominasi dalam perekonomian, pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Hal tersebut karena lapangan usaha pertanian ini merupakan lapangan usaha yang padat karya sehingga penyerapan tenaga kerjanya sangat baik.

Gambar 4.2.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Utama di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 (Periode Agustus)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017

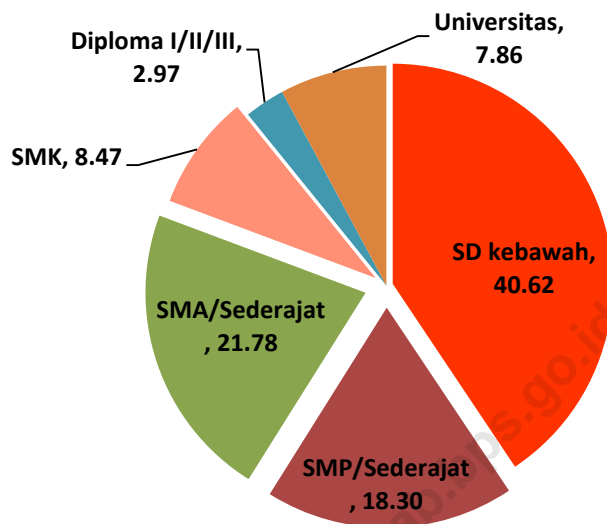
4.3 Potret Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan

Perkembangan ketenagakerjaan tidak hanya terfokus pada peningkatan jumlah tenaga kerja, akan tetapi juga harus didukung dengan kualitas yang mumpuni. Kualitas SDM yang baik akan menjadi modal bagi Kuantan Singingi untuk bersaing baik di level nasional maupun internasional. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing untuk memasuki pasar tenaga kerja global. Sesuai dengan visi misi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “ Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan”.

Kualitas tenaga kerja di Kuantan Singingi saat ini masih perlu ditingkatkan kembali. Sebagian besar tenaga kerja di Kuantan Singingi merupakan lulusan Sekolah Dasar atau lebih rendah. Dilihat dari persentasenya, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, 40,62 persen diantaranya lulusan SD ke bawah. Persentase lulusan terbesar kedua yaitu SMP/ sederajat sebesar 18,30 persen. Tenaga kerja yang hanya lulusan SD berkonsekuensi akan lebih banyak terserap pada kegiatan yang padat karya.

Kembali pada pembahasan tentang penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kuantan Singingi terserap pada lapangan usaha pertanian. Secara tidak langsung, komposisi tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan lapangan usaha ini menggambarkan bahwa potret tenaga kerja di Kuantan Singingi masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan tingkat pendidikan yang rendah.

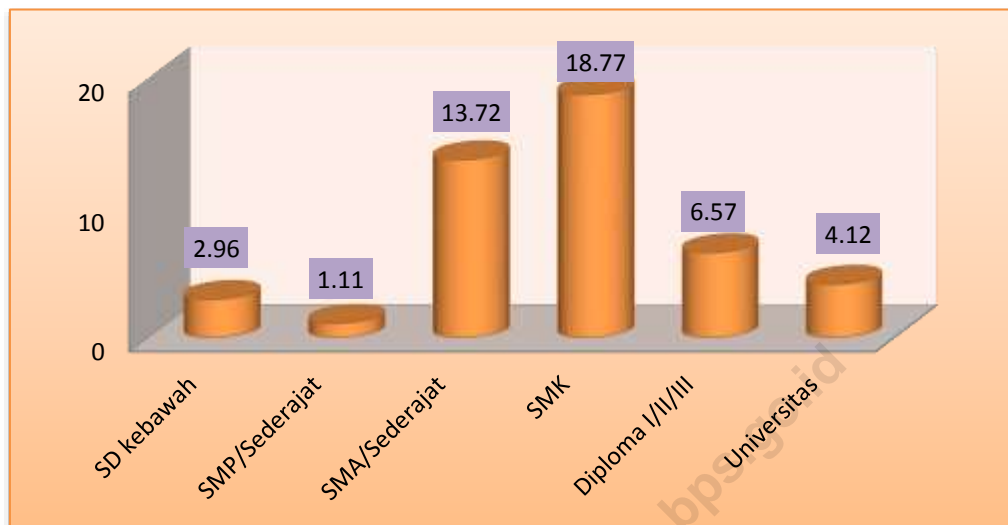
Gambar 4.3.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017 (Periode Agustus)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017

Lebih lanjut, TPT menurut tingkat pendidikan justru menunjukkan pola yang berbeda. Tingkat pendidikan diploma SMA, SMK, dan I/II/III memiliki angka TPT tertinggi yaitu sebesar 13,72 persen, 18,77 persen dan 6,57 persen. Sebaliknya, TPT untuk tingkat pendidikan SD ke bawah dan SMP justru menempati posisi paling rendah, yaitu 2,96 persen dan 1,11 persen. Semakin besarnya angka TPT di tingkat pendidikan yang lebih tinggi disebabkan semakin tinggi pendidikan seseorang, kecenderungan akan menjadi lebih pemilih dalam menerima pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau kualifikasi mereka. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, terutama lulusan SMP, SD atau bahkan di bawahnya, mereka akan cenderung lebih banyak menerima semua jenis pekerjaan, sehingga lebih banyak terserap dalam dunia usaha, terutama untuk pekerjaan yang padat karya.

Gambar 4.4.
TPT Menurut Tingkat Pendidikan di Kuantan Singingi, 2017 (Periode Agustus)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2017

Fakta bahwa lulusan SMA, SMK, dan diploma I/II/III justru menunjukkan angka TPT yang tinggi ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia usaha dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia. Pemerintah, terutama dunia pendidikan harus lebih banyak menciptakan calon sumber daya manusia dengan keterampilan yang memang banyak dibutuhkan di dunia usaha. Dengan adanya kesesuaian antara keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan akan menciptakan tenaga kerja yang profesional di bidangnya.

4.4 Peranan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penciptaan Lapangan Kerja

Berbicara tentang ketenagakerjaan di suatu daerah tidak lepas dari keterkaitannya dengan perekonomian di daerah tersebut. Seperti yang diketahui, tenaga kerja merupakan salah satu modal dalam perekonomian dimana asumsinya semakin besar modal maka nilai tambah yang dihasilkan pun akan semakin besar yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara langsung, hubungan tersebut menggambarkan bahwa perekonomian yang tinggi diharapkan menyerap banyak tenaga kerja.

Melihat ke perekonomian Kuantan Singingi, tampak adanya perkembangan yang baik, terutama selama dua tahun terakhir. Seperti yang diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kuantan Singingi membaik di tahun 2016 dan 2017 dibandingkan tahun 2015, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 3,88 persen dan 4,43 persen sedangkan pada tahun 2015 sebesar *minus* 2,14.

Upaya-upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan harus terus digalakkan mengingat Kabupaten Kuantan Singingi akan mulai menikmati bonus demografi. Penduduk usia produktif ini harus dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian agar tidak menjadi beban pembangunan. Salah upaya yaitu dengan menggerakkan lapangan usaha yang padat karya seperti UMKM. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, diketahui bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Rumah Tangga (URT) di Kuantan Singingi mencapai 99 persen dari total jumlah usaha yang ada. Namun, UMK dan URT ini masih memiliki andil yang minim terhadap perekonomian. Oleh karena itu, dengan adanya pengembangan UMK dan URT ini diharapkan selain membantu menopang perekonomian juga dapat membantu menyerap lapangan pekerjaan di Kuantan Singingi.

A top-down view of a dark wood-grain desk. In the upper left, a small chalkboard with a wooden frame has 'BAB 5' written in white chalk. To its right is a white coffee cup on a saucer. Below the coffee is a small vertical photo of a person. In the lower left, there is a vintage camera and several other photos, including one of a blue landscape and one of a yellow object.

BAB 5

POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA

POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA

Pola konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya. Keduanya akan membentuk pola kebiasaan tertentu dalam mengkonsumsi barang dan jasa pada suatu kelompok masyarakat. Pola konsumsi masyarakat dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan melalui besaran nilai rupiah yang dibelanjakan. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dapat menunjukkan tingkat kemampuan daya beli yang selanjutnya akan menggambarkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat daya beli masyarakat maka akan semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari hari yang menunjukkan semakin sejahtera masyarakat tersebut.

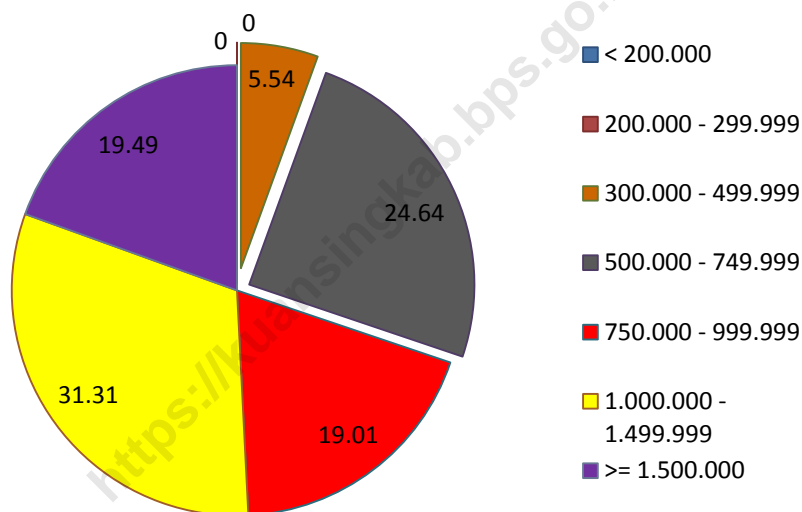
Pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut cenderung berpenghasilan rendah. Sebaliknya, semakin tinggi penghasilan rumah tangga, maka akan semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1 Pola Konsumsi Masyarakat

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran perkapita penduduk Kuantan Singingi sebagian besar sudah cukup tinggi. Sebesar 50,58 persen penduduk

di Kuantan Singingi tahun 2017 masuk dalam golongan pengeluaran perkapita sebulan lebih dari sama dengan satu juta. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, persentase penduduk dengan pengeluaran perkapita satu juta ke atas hanya 37,22 persen. Hal ini menggambarkan adanya indikasi peningkatan kesejahteraan rakyat di tahun 2017.

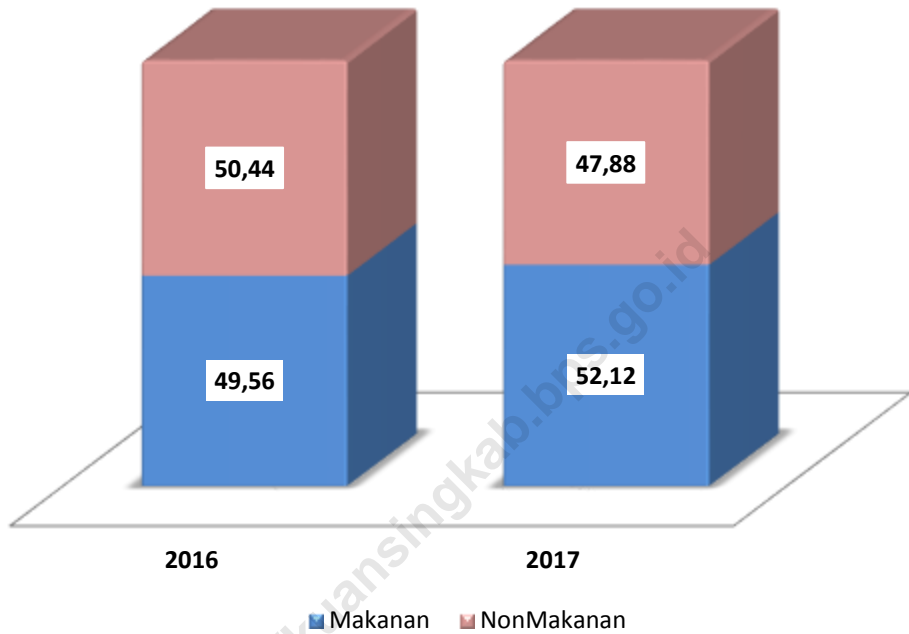
Gambar 5.1.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Selanjutnya, apabila dibedah menurut jenis pengeluaran, maka akan tampak adanya dominasi makanan daripada non makanan. Pada tahun 2016, pengeluaran perkapita sebulan didominasi oleh makanan yang sebesar Rp 558.718 atau sekitar 49,56 persen dari total pengeluaran. Sementara sisanya, 50,44 persen atau setara dengan Rp 568.697 merupakan pengeluaran non makanan. Selanjutnya, pada tahun 2017 persentase pengeluaran untuk makanan meningkat dari tahun sebelumnya. Dari total pengeluaran perkapita sebulan yang senilai Rp 1.200.692, sebesar 52,12 persen digunakan untuk membeli kebutuhan makanan atau sekitar Rp. 625.911 dan sisanya sebesar 47,88 persen digunakan untuk membeli kebutuhan non makanan atau senilai Rp. 575.051

Gambar 5.2.
Persentase Perbandingan Rata – Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2016 dan 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016 & 2017



PERUMAHAN & LINGKUNGAN

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang (pakaian) dan pangan (makanan). Rumah tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dimiliki manusia sebagai tempat untuk berlindung. Lebih luas, pemanfaatan rumah sebagai tempat tinggal tidak hanya sekedar tempat berlindung, akan tetapi harus memenuhi standar kelayakan agar dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam rumah tangga, rumah juga menjadi tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Interaksi sosial pertama seseorang yaitu dalam keluarga sehingga proses pendidikan anak juga dimulai di dalam rumah. Oleh karena itu, rumah yang layak juga menjadi salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak menjadi generasi yang berkualitas. Pentingnya kelayakan rumah tinggal ini dapat terlihat dari perhatian dunia melalui salah satu tujuan dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan atau yang sering disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui tujuannya yang kesebelas yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

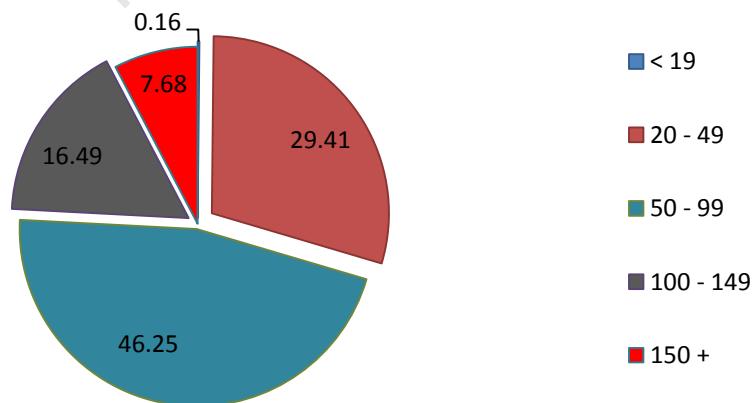
Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, rumah juga menjadi salah satu indikator status sosial seseorang. Semakin tinggi tingkat sosial seseorang, semakin lengkap fasilitas rumah yang dimiliki dan juga menunjukkan tingkat kesejahteraan pemiliknya. Logikanya, semakin sejahtera suatu rumah tangga maka kemampuan

6.1 Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal

Berdasarkan kepemilikan, pada tahun 2017 di Kuantan Singingi persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebanyak 84,31 persen. Pentingnya status kepemilikan rumah ini sebagai indikasi kesejahteraan masyarakat. Dengan menguasai rumah milik sendiri, diharapkan suatu rumah tangga lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lain karena kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang telah mampu dipenuhi. Selain itu, dari sisi psikologis, status penguasaan rumah milik sendiri akan memberikan ketenangan bagi penghuninya dibandingkan dengan menempati rumah sewa atau bebas sewa.

Terkait kualitas, kelayakan rumah tempat tinggal perlu dilihat dari komponen material pembentuknya seperti luas lantai hunian, jenis atap, lantai dan dinding. Setiap komponen pembentuk rumah turut mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Rumah tinggal yang dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal tersebut.

Gambar 6.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah
di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

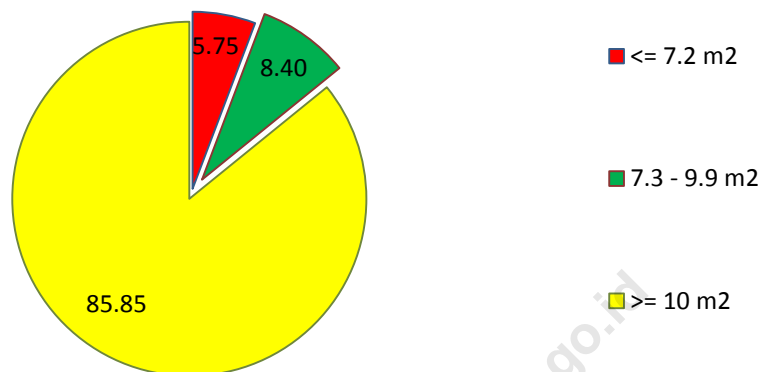
Dari sisi luas lantai, sebesar 46,25 persen rumah tangga di Kuantan Singingi telah menghuni rumah dengan luas lantai 50-99 m² dan 29,41 persen dengan luas lantai 20-49 m². Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau

rata- rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga sehingga tingkat kelayakan tidak cukup dilihat dengan luas rumah dalam sebuah rumah tangga. Namun, penting untuk melihat jumlah anggota rumah tangga yang menghuni rumah tersebut. Oleh karena itu kelayakan rumah lebih mudah diukur dengan luas hunian per kapita.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2017).

Untuk kondisi Kuantan Singingi, sebanyak 85,85 persen rumah tangga telah menghuni rumah dengan luas lantai 10 m² atau lebih per kapita. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menghuni rumah dengan luas yang layak sesuai dengan kriteria baik yang diberikan WHO maupun pemerintah Indonesia. Sementara itu, masih terdapat 5,75 persen rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai per kapita seluas $\leq 7,2$ m².

Gambar 6.2
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah Per Kapita
di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



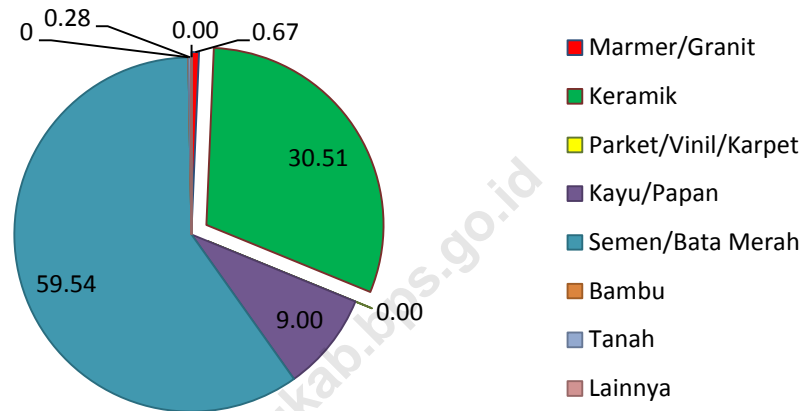
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Jenis lantai rumah tempat tinggal dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya. Lantai rumah yang baik adalah lantai rumah yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Jenis lantai yang memenuhi kriteria tersebut yaitu lantai yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah. Lantai tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria lantai yang sehat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Selain itu, jenis lantai ini juga digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Melalui jenis lantai, kesejahteraan masyarakat tersebut dilihat dari tingkat kualitas perumahan yang dimiliki rumah tangga tersebut. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer diasumsikan mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumah tangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin, atau tanah. Di Kuantan Singingi, mayoritas rumah tangga menghuni rumah dengan lantai terluas Semen/Bata Merah,

sebanyak 59,54 persen. Sementara itu, masih terdapat 0,28 persen yang masih menghuni rumah tinggal dengan luas lantai berupa tanah.

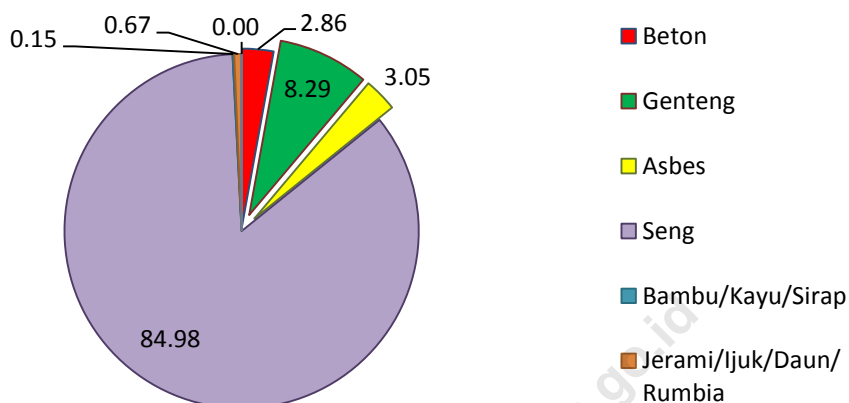
Gambar 6.3.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah
di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Selain dari komponen lantai, kualitas rumah tinggal juga dapat dari jenis atap dan dinding terluas. Sama halnya dengan jenis lantai, jenis atap dan dinding juga dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga dimana semakin baik kualitas atap dan dinding rumah maka kesejahteraan rumah tangga tersebut akan semakin baik. Di Kuantan Singingi ini mayoritas rumah tangga menggunakan seng sebagai atap rumah tinggal.

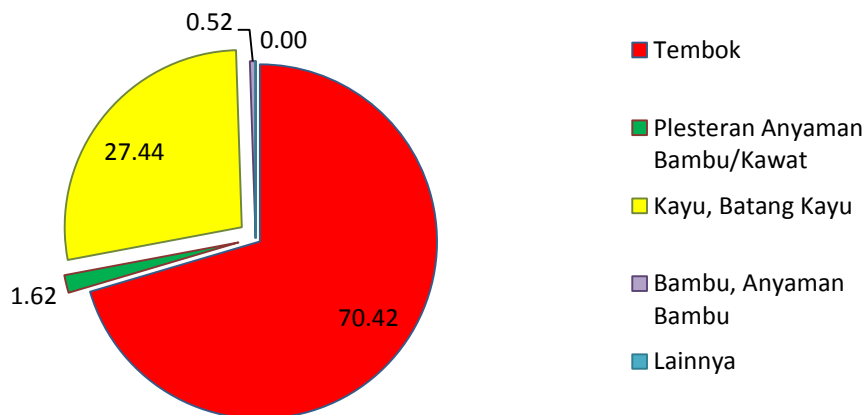
Gambar 6.4.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah
di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Sementara itu, berdasarkan material pembentuk dinding terluas, rumah tinggal masyarakat di Kuantan Singingi didominasi oleh dinding tembok sebesar 70,42 persen. Hal ini menunjukkan kualitas dinding rumah masyarakat sebagian besar telah memenuhi standar layak.

Gambar 6.5.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas
di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

6.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal masyarakat selain dilihat dari komponen material pembentuk, juga diperlukan fasilitas penunjang sehari-hari seperti sumber air minum bersih, sanitasi yang layak, dan sumber penerangan yang memadai. Kelengkapan fasilitas pokok rumah tinggal akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang kemudian turut menentukan kualitas rumah tinggal tersebut.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Dalam tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, salah satu indikator yang digunakan yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, dalam tujuan keenam yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, ketersediaan sumber air minum layak dan berkelanjutan ini juga menjadi salah satu indikator. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya masalah ketersediaan air minum layak bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum di Kuantan Singingi, 2017

Sumber Air Minum Bersih		Sumber Air Minum Layak		Air Kemasan/ Isi Ulang
Air Bersih	Tidak	Air Bersih/ Air Hujan	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72,08	27,92	33,46	66,54	40,62

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

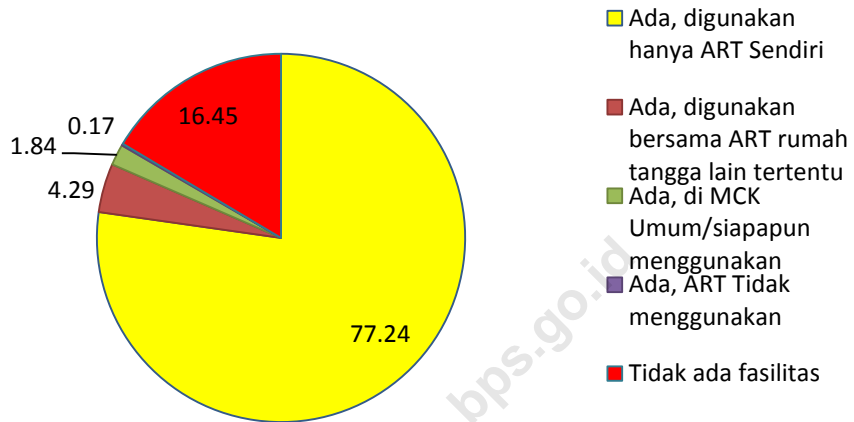
Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan

(PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Di Kuantan Singingi, terdapat 72,08 persen rumah tangga yang menggunakan air minum yang bersih. Sementara itu, dari sisi kelayakan dan keberlanjutan, hanya sebesar 33,46 persen rumah tangga yang menggunakan air minum layak dan berkelanjutan.

Sumber air minum yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Apabila air minum yang dikonsumsi merupakan air minum yang tidak layak, maka akan rentan terhadap penyakit khususnya diare. Kondisi tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak – anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak – anak harus tumbuh dengan baik dan sehat agar terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.

Selanjutnya, fasilitas rumah tangga yang sangat perlu untuk diperhatikan yaitu masalah sanitasi, salah satunya yaitu ketersediaan sarana jamban. Apabila ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air yang berujung pada tingkat kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Di Kuantan Singingi hingga tahun 2017, masih terdapat 16,45 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 16,77 persen, Angka ini mengalami perbaikan.

Gambar 6.6.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar
di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



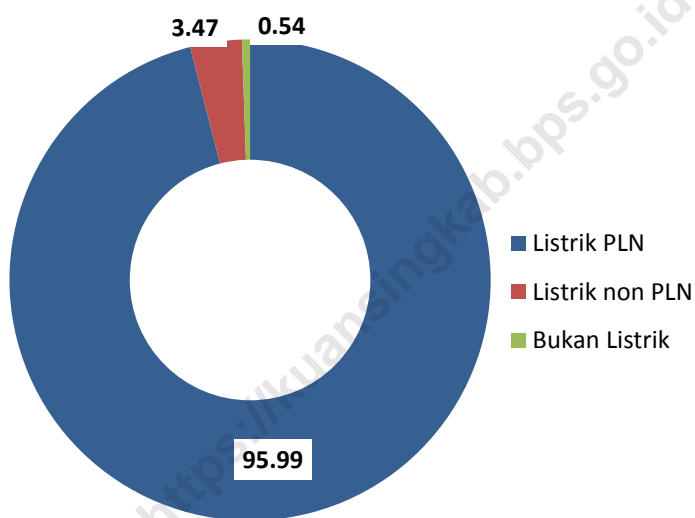
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Kelayakan fasilitas buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan juga perlu dilihat dari jenis kloset dan tempat pembuangan akhir tinja dimana yang dianjurkan yaitu kloset leher angsa dengan tempat pembuangan tangki septik/SPAL. Di Kuantan Singingi, dari rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar, sudah 93,45 persen rumah tangga yang sudah menggunakan kloset leher angsa. Sementara itu, menurut tempat pembuangan akhir tinja, 82,06 persen rumah tangga sudah menggunakan tangki dengan dasar semen, sedangkan sisanya masih menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting yaitu penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Sampai tahun 2017, rumah tangga di Kuantan Singingi belum seratus persen telah dijangkau oleh listrik. Adapun rumah tangga yang sudah dijangkau oleh listrik PLN sebesar 95,99 persen, sedangkan 3,47 persen menggunakan listrik tapi bukan PLN. Sisanya, 0,54 persen belum

menggunakan listrik. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase rumah tangga pengguna listrik PLN ini mengalami peningkatan dari tahun 2015/6 yang sebesar 93,90 persen. Pengusahaan listrik oleh pemerintah melalui PLN terus diupayakan keterjangkauannya hingga ke pelosok daerah.

Gambar 6.7.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan
di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

A top-down view of a dark wood-grain desk. In the upper left, a small chalkboard with a wooden frame has 'BAB 7' written in white chalk. To its right is a white coffee cup on a saucer. Below the coffee cup is a small vertical Polaroid photo. In the lower left, there is a vintage silver camera and several other Polaroid photos, one of which is yellow. The text 'POTRET KEMISKINAN' is printed in large, white, stylized letters on the right side of the desk.

BAB 7

POTRET
KEMISKINAN

POTRET KEMISKINAN

Gambaran kesejahteraan masyarakat paling mudah memang dilihat dari tingkat kemiskinan. Namun, kemiskinan ini sendiri adalah suatu indikator yang multidimensi. Kemiskinan tidak hanya mencakup kondisi ekonomi, akan tetapi kondisi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan seperti menjadi mata rantai yang dapat menjadi sebab dan sekaligus menjadi akibat dari masalah-masalah sosial dan ekonomi lainnya. Tidak hanya pada level mikro, masalah kemiskinan ini juga berimbas pada kondisi sosial dan ekonomi secara makro.

Berpengaruhnya masalah kemiskinan terhadap pembangunan menjadikan masalah kemiskinan ini sering dikaitkan dengan masalah-masalah nasional lainnya. Tidak heran jika kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di berbagai negara lain pun demikian. Dalam kesepakatan dunia internasional, pengentasan kemiskinan ini menjadi tujuan pertama dalam SDGs. Hal ini menjadi bentuk kepedulian dunia internasional terhadap masalah kemiskinan.

Kemiskinan memiliki banyak sudut pandang. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2017).

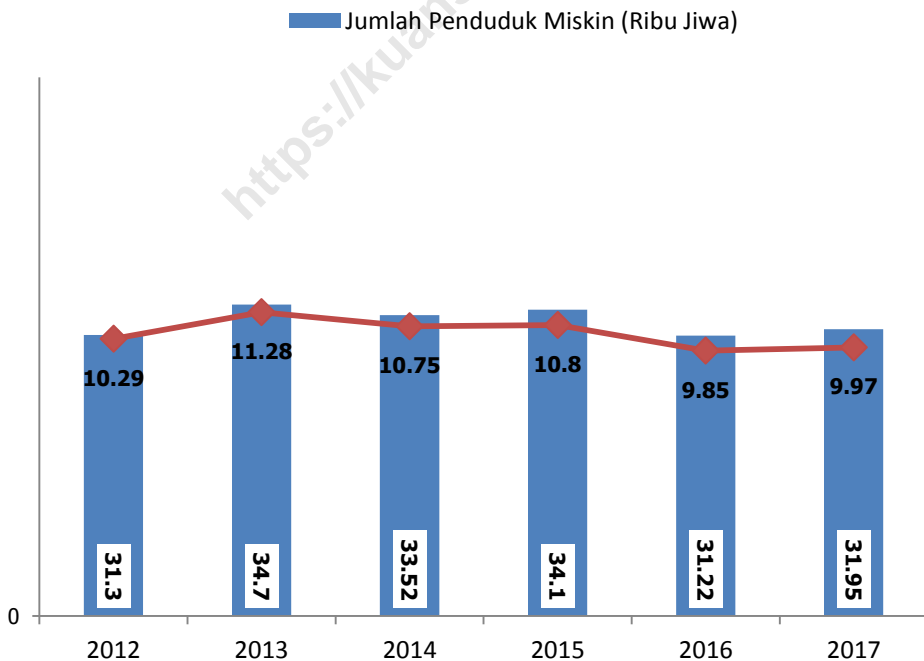
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Indikator kemiskinan ini sangat identik dengan pendapatan penduduk. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin

mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Pemerintah selaku perancang dan pengambil kebijakan terus berupaya merumuskan paket-paket kebijakan terkait pengentasan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Pengentasan masalah kemiskinan ini memang tidak mudah. Kemiskinan ini seperti lingkaran yang membelenggu dimana kemiskinan ini bisa menjadi sebab sekaligus menjadi akibat dari rendahnya kualitas kehidupan manusia. Kompleksnya masalah kemiskinan ini, menjadikan masalah ini tidak mudah untuk dituntaskan.

Gambar 7.1.
Jumlah & Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi, 2012-2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 – 2017

Pengentasan kemiskinan ini sesungguhnya telah diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai macam program yang telah direncanakan baik di level nasional

maupun daerah. Selama periode 2013-2017, persentase kemiskinan di Kuantan Singingi cukup mengalami penurunan dari 10,29 persen menjadi 9,97 persen (periode Maret).

7.2 Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Pembahasan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah, persentase, dan perkembangannya. Indikator yang juga perlu diperhatikan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 7.1.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, 2013 –2017

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	1,89	0,51	378 811
2014	1,62	0,51	422 691
2015	1,48	0,36	441 315
2016	1,45	0,33	468 199
2017	1,47	0,35	497 747

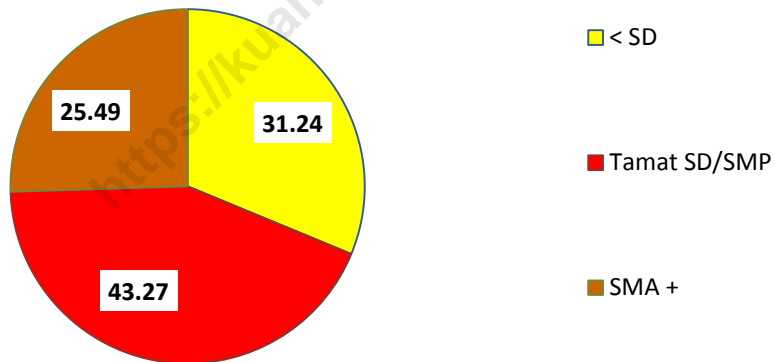
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 – 2017

Berdasarkan nilai P1 dan P2 di Kuantan Singingi sepanjang tahun 2013-2017, nilai P1 dan P2 mengalami penurunan.

7.3 Karakteristik Pendidikan dan Ketenagakerjaan Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan tentu tidak lepas dari karakteristik sosial penduduk miskin itu sendiri, salah satunya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi diyakini lebih berpeluang mengakses lapangan pekerjaan yang lebih baik sehingga pendapatan yang diperoleh akan lebih tinggi dan secara langsung akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan penduduk itu sendiri. Di Kuantan Singingi, karakteristik penduduk miskin usia 15 tahun ke atas didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tamat SD/SMP, yaitu sebesar 43,27 persen.

Gambar 7.2.
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Kuantan Singingi 2017

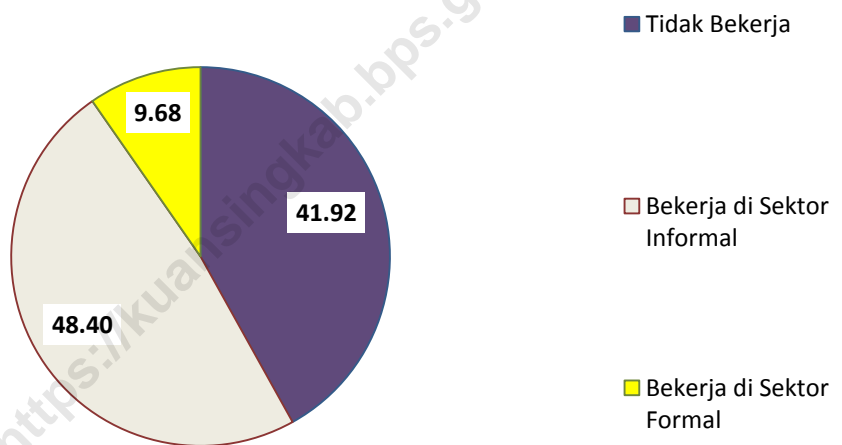


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Selanjutnya, keterkaitan antara kemiskinan dan ketenagakerjaan. Sebagian besar beranggapan bahwa penduduk miskin sebagian besar merupakan pengangguran. Padahal, kondisi sebenarnya justru berlaku sebaliknya. Sebagian besar penduduk miskin justru bekerja karena kebutuhan sehari-hari menuntut mereka untuk bekerja meskipun dengan penghasilan yang relatif kecil. Fenomena ini terutama terjadi di kalangan masyarakat dengan kategori sangat miskin dengan

pendidikan rendah. Dalam keadaan tersebut mereka akan tetap bekerja agar dapat bertahan hidup. Fenomena ini juga berlaku di Kuantan Singingi dimana 48,40 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja. Namun, dengan keterbatasan kualitas SDM yang dimiliki, mereka akan cenderung memilih sektor informal karena lebih mudah diakses meskipun dengan penghasilan yang rendah.

Gambar 7.3.
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan di Kuantan Singingi 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

A top-down view of a wooden desk with various items: a chalkboard with 'BAB 8' written on it, a white coffee cup on a saucer, a vintage camera, and several Polaroid-style photos scattered around.

BAB 8

INDIKATOR SOSIAL LAINNYA

INDIKATOR SOSIAL LAINNYA

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini tampak merubah banyak hal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari konsidi sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya.

Seiring dengan perubahan yang terjadi, tingkat kebutuhan manusia mulai mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier, kini telah berubah menjadi kebutuhan primer. Contoh sederhana seperti kebutuhan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, berlibur atau berwisata, bahkan eksistensi di tengah masyarakat pun kini menjadi kebutuhan. Hal-hal tersebut tidak lagi terpisahkan dalam kehidupan masyarakat secara umum sehingga menjadi wajar apabila indikator sosial semacam itu kini menjadi salah satu pengukuran perkembangan kesejahteraan masyarakat.

8.1 Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Menjadi Kebutuhan Primer

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini berkembang begitu pesat. Perkembangan ini menjadi salah satu pendorong arus globalisasi. Di era TIK yang semakin canggih dan mudah diakses, jarak tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antar individu maupun antar lembaga atau usaha. Ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses terhadap TIK ini akan mempengaruhi pergerakan manusia dalam berbagai urusan, baik itu urusan antar individu, urusan pemerintahan, bisnis, politik, serta urusan yang lainnya. Secara otomatis, akses terhadap TIK ini menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan suatu daerah.

Salah satu tantangan pembangunan negara yang luas seperti Indonesia ini yaitu penyediaan layanan infrastruktur yang merata untuk memudahkan konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain secara cepat. Layanan infrastruktur yang dibutuhkan ini tidak hanya tentang pembangunan secara fisik seperti jalan dan

transportasi, akan tetapi infrastruktur pendukung akses terhadap TIK juga sangat penting untuk diprioritaskan.

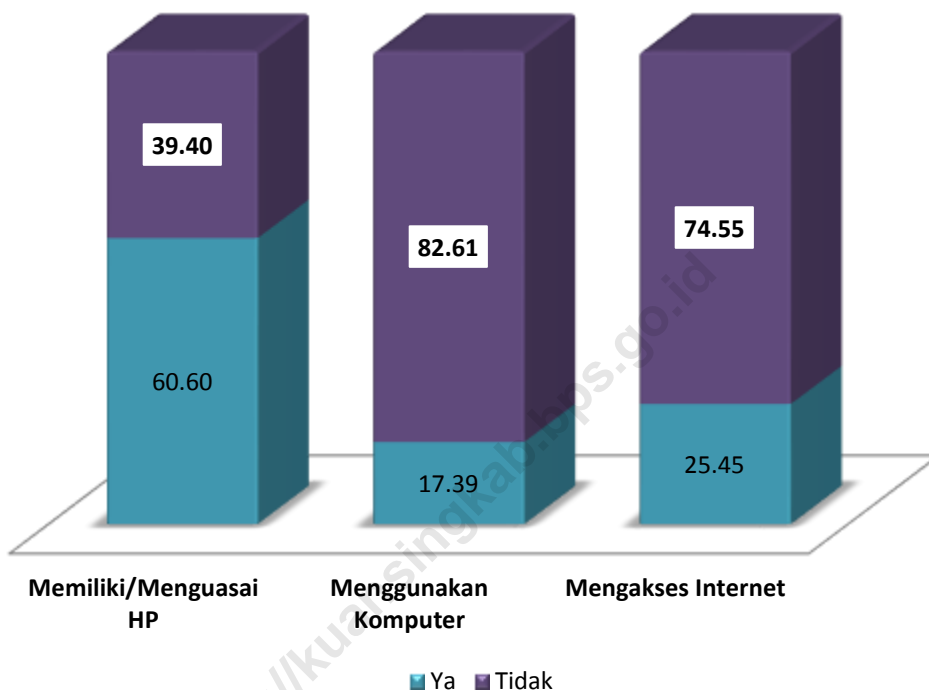
Kemajuan TIK ini memberikan manfaat yang sangat positif bagi masyarakat. Jika ini dapat dikembangkan dengan optimal, akan dapat mengdongkrak kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan TIK, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses TIK, diharapkan kehidupan akan terus bergerak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Dahulu kala, kepemilikan alat TIK seperti *handphone* dan komputer hanya terbatas pada kalangan ekonomi kelas atas. Di sebagian besar masyarakat, TIK ini sebagai barang mewah yang tidak dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, kini kebutuhan akan TIK sudah menjadi kebutuhan primer dan bahkan *handphone* menjadi bagian dari gaya hidup semua kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin terjangkaunya harga *smartphone* dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet. Masyarakat semakin mudah mengakses segala informasi yang diinginkan.

Pada tahun 2017, persentase penduduk berumur lima tahun ke atas yang memiliki/menguasai telepon seluler sebanyak 60,60 persen. Hal ini menunjukkan sudah lebih dari setengah penduduk berumur lima tahun ke atas telah memiliki terakses telepon seluler.

Berbeda dengan telepon seluler, penggunaan komputer menunjukkan angka yang lebih kecil. Persentase penduduk yang mengakses komputer di Kuantan Singingi pada tahun 2017 hanya 17,39 persen. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat membutuhkan komputer, hanya pekerjaan dan urusan tertentu saja yang memanfaatkan komputer. Sementara untuk telepon seluler penggunaannya lebih mudah dioperasikan, lebih terjangkau, mobilitasnya juga lebih mudah, dan sebagian besar hanya digunakan untuk komunikasi, sedangkan komputer lebih kompleks.

Gambar 8.1.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut
Beberapa Akses Terhadap TIK di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



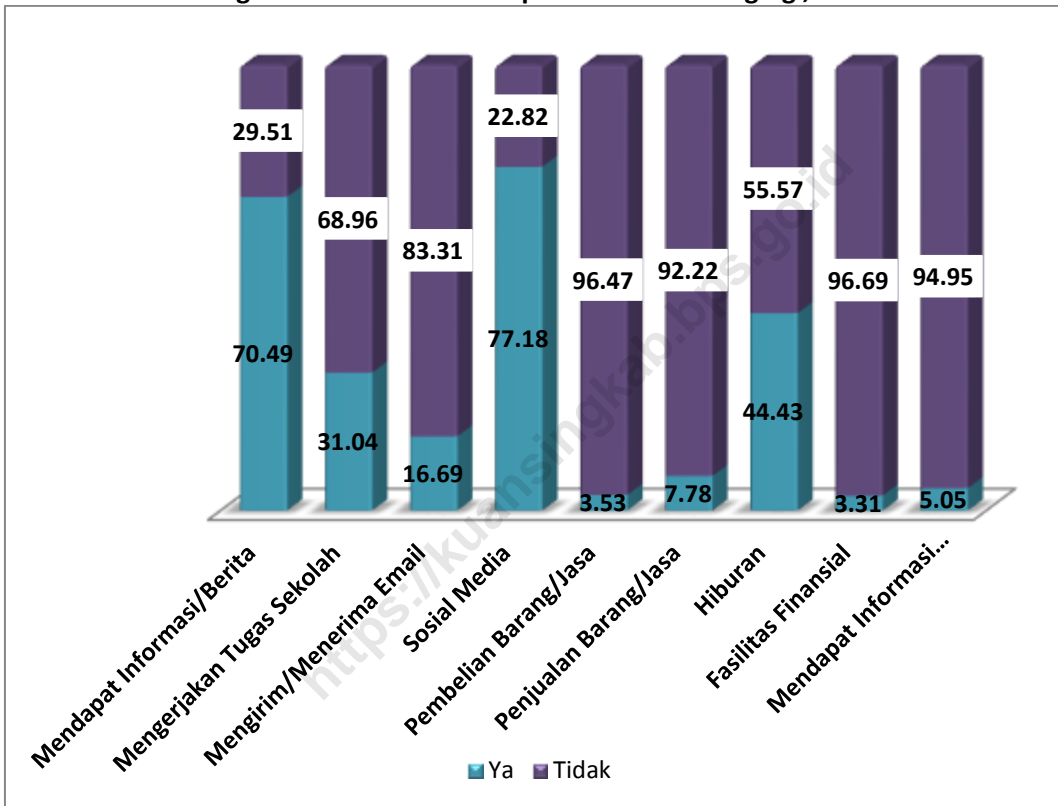
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Seiring perkembangan arus informasi yang bergerak cepat dimana sebagian masyarakat membutuhkannya untuk menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, maupun hiburan, penggunaan telepon seluler ini sangat diminati masyarakat. Hal ini mengundang para vendor telepon seluler untuk berlomba-lomba menguasai pasar.

Akses TIK lainnya yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, keterkaitannya dengan penggunaan komputer dan telepon seluler yaitu penggunaan internet. Dengan menggunakan internet, masyarakat tidak hanya dapat menjangkau informasi di sekitar lingkungan saja, akan tetapi informasi dari seluruh belahan dunia dapat diakses. Internet saat ini menjadi kebutuhan primer di berbagai keperluan, baik itu dunia usaha, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, layanan masyarakat, politik, dan yang lainnya. Penggunaan Internet di Kuantan Singingi pada tahun 2017 sebesar

25,45 persen. Dari sisi pemanfaatan, tampak bahwa internet telah digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk mendapatkan informasi/berita dan media sosial (Gambar 8.2.).

Gambar 8.2.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut untuk Apa Saja Mengakses Internet di Kabupaten Kuantan Singingi, 2017



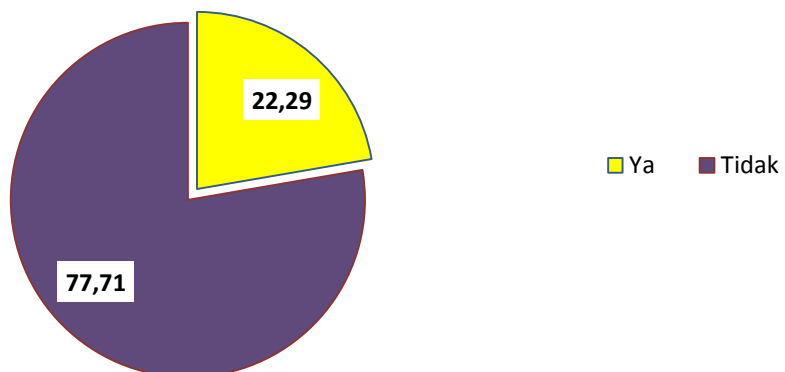
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

8.2 Perjalanan Wisata sebagai Bagian dari Gaya Hidup

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan, masyarakat cenderung akan memenuhi kebutuhan tersier sebagai bagian dari gaya hidup dimana salah satunya yaitu melakukan perjalanan wisata. Masyarakat yang menyempatkan diri untuk melakukan perjalanan wisata dianggap sejahtera karena diasumsikan mampu melakukan perjalanan wisata yang berarti kebutuhan pokok lainnya telah terpenuhi.

Perjalanan wisata menurut konsep yang digunakan dalam Susenas Kor adalah perjalanan yang dilakukan penduduk Indonesia dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan tidak bertujuan untuk sekolah, bekerja (memperoleh upah/gaji) di tempat yang dituju, mengunjungi objek wisata komersial, dan atau menginap di usaha jasa akomodasi, dan atau jarak perjalanan pulang pergi sama atau lebih besar dari 100 km. Perjalanan bersifat bukan rutin. Adapun tujuan utama bepergian antara lain untuk berlibur/rekreasi atau olah raga/ kesenian.

Gambar 8.3.
Persentase Penduduk Menurut Apakah Bepergian dalam 1 Tahun Terakhir, Kabupaten Kuantan Singingi 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Berdasarkan Susenas 2017 periode Maret, terdapat 22,29 persen penduduk Kuantan Singingi yang bepergian dalam 1 tahun terakhir.

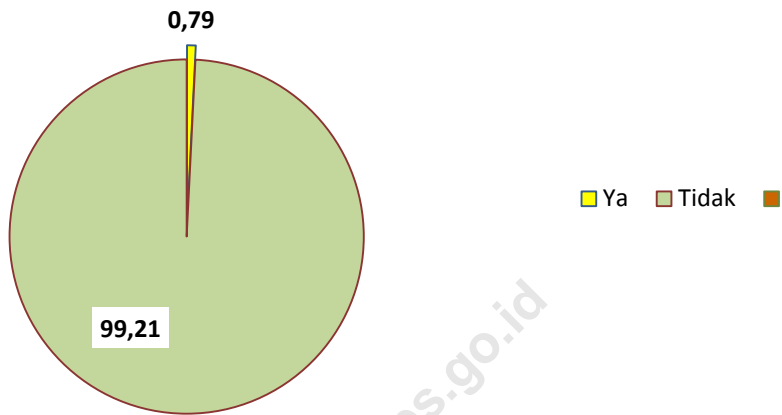
8.3 Tindak Kejahatan Masih Perlu Diwaspadai

Rasa aman dari tindak kejahatan menjadi salah satu indikator pendukung yang mencerminkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok sehari – hari, akan tetapi rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas juga harus terpenuhi. Dalam penyusunan Indeks Kebahagiaan Indonesia oleh BPS tahun 2014, rasa aman ini juga menjadi salah satu aspek penyusunnya.

Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan (BPS). Tindak kejahatan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya akibat kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pada tahun 2017, masih terdapat 0,79 persen penduduk yang menjadi korban kejahatan. Jenis kejahatan yang dialami dapat berupa pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan lainnya.

Gambar 8.4.
Persentase Penduduk Menurut Apakah Pernah Menjadi Korban Kejahatan,
Kabupaten Kuantan Singingi 2017

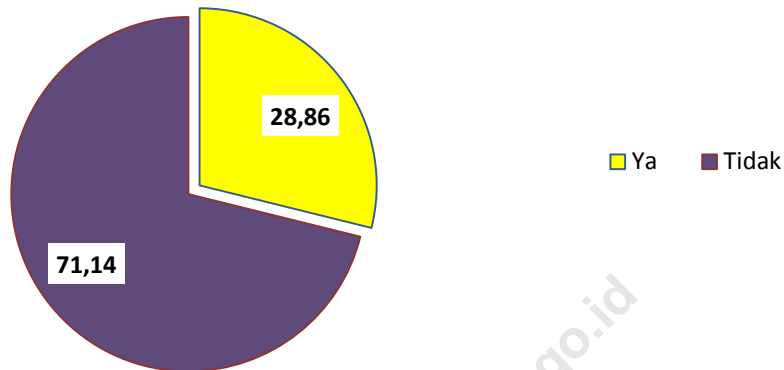


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

8.4 Kredit Usaha Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Aliran dana kepada masyarakat berupa kredit usaha dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktivitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Gambar 8.5.
Persentase Rumah Tangga Mendapatkan Kredit Usaha Selama 1 Tahun Terakhir,
Kabupaten Kuantan Singingi 2017



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Di Kuantan Singingi, pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha sebesar 28,86 persen. Kredit Usaha yang dimaksud dapat berbentuk Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi. Kredit Modal Kerja dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dalam operasional bisnis, sedangkan Kredit Investasi lebih diarahkan untuk pengadaan barang modal jangka panjang. Kredit usaha dapat berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan bisa juga berupa PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), program bank selain KUR, KUBE/KUB, program koperasi, perorangan dengan bunga, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2010-2020. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2014. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2013. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2015. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2014. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2016. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2017. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. 2018. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. 2018. Kuantan Singingi dalam Angka Tahun 2018. Teluk Kuantan: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2014. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Riau 2013 (Agustus). Pekanbaru: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2016. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Riau 2015 (Agustus). Pekanbaru: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2017. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Riau 2017 (Agustus). Pekanbaru: BPS

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Roesdi S. Abrus No.12
Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, RIAU
Telp. (0760) 21190
Website : <http://kuansingkab.bps.go.id>

